



fiskal

waspada antisipatif responsif



No ISSN: 2337-6309

Transformasi Ekonomi (APBN 2024)

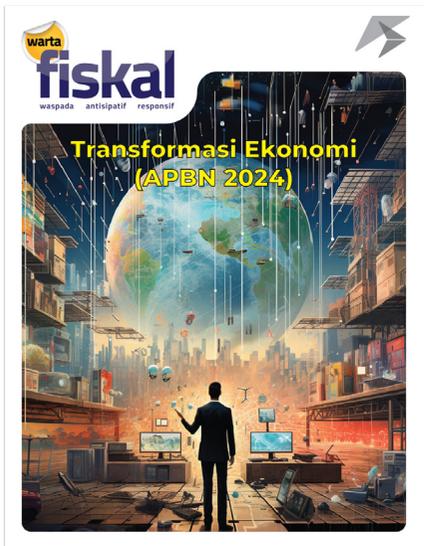
Dukungan Perpajakan untuk Transformasi Ekonomi Indonesia Demi Masyarakat Indonesia yang Lebih Sejahtera

Film dan Pariwisata, Potensi Ekonomi melalui Kolaborasi dan Sinergi

Wawancara Carmelita Hartoto:
Hilirisasi untuk Percepatan Transformasi



Edisi III/2023



Warta Fiskal dapat diunduh
melalui website
fiskal.kemenkeu.go.id

atau silahkan pindai QRcode
dibawah ini:



Redaksi menerima tulisan/artikel dari pembaca mengenai berbagai topik di bidang fiskal. Tulisan seyogyanya mengulas isu-isu aktual dan tidak hanya sekedar ulasan tertulis. Panjang naskah antara 1200-1400 kata di luar tabel dan grafik.

Silahkan kirim ke: wartafiskal@kemenkeu.go.id

Diterbitkan oleh:

Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI

Penanggung Jawab:

Dini Kusumawati

Dewan Redaksi:

Syahrir Ika, Endang Larasati, Sofia Arie Damayanty,
Agunan P. Samosir, Hadi Setiawan, Adelia Surya
Pratiwi

Tim Redaksi:

Fatima Medina Septiyanti, Cornelius Tjahjaprijadi,
Rita Helbra Tenrini, Sidiq Suryo Nugroho, Rosyid
Bagus Ginanjar Habibi, Indha Sendary, Chintya
Pramasanti, Cessa Seftari, Indrawan Susanto, Patria
Yoga Asmara, Mohamad Nasir, Angga Eko Prasetyo
Wirastomo, Anggi Pratiwi

Desain Grafis:

Mochammad Bentar Prakoso

Sekretariat:

Lutfi Nursela Feninsa



Transformasi Ekonomi dan APBN 2024

Syahrir Ika¹

Dari sudut pandang perjalanan pembangunan ekonomi, Indonesia masih menghadapi tantangan perangkap pendapatan menengah (*middle income trap*). Perlu keajaiban ekonomi (*economic miracle*) dan keajaiban politik (*political miracle*) yang terkonsolidasi saling memengaruhi untuk membawa Indonesia bisa keluar dari *middle income trap* dan memastikan Indonesia bisa menjadi negara maju pada tahun 2045. Perilaku ekonomi mempengaruhi perilaku politik, dan sebaliknya perilaku politik

memengaruhi perilaku ekonomi. Tarik menarik dua model perilaku ini akan menentukan keberhasilan atau kegagalan bangsa ini keluar dari *middle income trap*. Kita percaya dengan kemampuan kita, tetapi untuk menghadapi masalah dan tantangan pembangunan yang demikian besar, tidak cukup hanya mengandalkan cara kita sendiri (*the Indonesian way*). Indonesia perlu mengadopsi cara-cara bangsa lain tetapi dilakukan secara kreatif - *adopt but in a creative way*.

Dari sisi strategi dan kebijakan ekonomi, Indonesia sudah mulai memasuki

tahap konsolidasi, tetapi dari sisi politik fase konsolidasi itu masih jauh. Padahal, konsolidasi politik merupakan *assumption* terjadinya konsolidasi ekonomi untuk membuat ekonomi bangsa ini melaju lebih cepat dengan kemakmuran yang lebih merata dan berkesinambungan. Konsolidasi politik dan demokrasi menuntut masyarakat kelas menengah yang kuat, sementara membentuk kelas menengah yang kuat membutuhkan dukungan politik dan demokrasi (Kuhns, 1970). Pertanyaannya, harus

¹Dewan Redaksi Warta Fiskal

dimulai dari mana? Karena pembangunan di-*drive* dari kebijakan ekonomi, maka transformasi harus dimulai dari ekonomi, dengan mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau *state budget roles*. Transformasi ekonomi harus mengarah pada pertumbuhan dan kemakmuran atau pertumbuhan yang inklusif, yang berkualitas. Ekonomi bisa saja tumbuh tinggi, tetapi jika tidak dirasakan oleh banyak penduduk, maka yang terjadi adalah ketimpangan pendapatan (*income inequality*) dan ketimpangan kebahagiaan (*happiness inequality*). Kebijakan yang dibutuhkan bukan sekadar menurunkan "Koefisien Gini" yang saat ini 'sedang tinggi', tetapi lebih dari itu, memperbesar *value*-nya, yaitu *income per capita*. Mengapa? Karena menggeser Koefisien Gini mendekati '*line of perfect equality*', bisa saja terjadi 'dalam angka' atau 'hanya kurvanya yang bergeser', tetapi belum tentu terjadi perubahan atau pergeseran dalam nilai atau *value*.

Dalam proses transformasi ekonomi, pemerintah harus mampu mendefinisikan dengan jelas apa makna dari tingginya GDP Indonesia, apa makna dari GDP Indonesia di ranking 16 dunia dan nanti akan pindah ke ranking 4 atau 5 dunia pada tahun 2045, dan apa makna Koefisien Gini lebih rendah dari 0,40, dan masih banyak lagi prestasi atau capaian lainnya.

Transformasi ekonomi harus menjawab perubahan apa yang terjadi dan seberapa besar dan luas dirasakan masyarakat. Bisa jadi karena 'pemaknaan yang tidak sama', maka *value* yang dirasakan juga berbeda, antara yang dirasakan pemerintah dengan yang dirasakan pelaku usaha, dan masyarakat umum. Karena itu, tantangan transformasi ekonomi Indonesia adalah tidak saja membuat pemahaman yang sama atas semua itu tetapi juga membuat perasaan yang relatif sama, disinilah ukuran *value* dari sebuah proses transformasi ekonomi yang berhasil.

Banyak tembok *status quo* yang perlu dirobohkan untuk membuat Indonesia bisa keluar dari jebakan transformasi pembangunan. Kita bisa belajar dari Korea Selatan. Menurut Howe (2019), negara harus mengevaluasi dan mempertimbangkan pencapaian-pencapaian negara dan masyarakat serta tantangan-tantangan yang ada dalam jebakan transformasi politik, termasuk tantangan-tantangan yang sedang berlangsung dan di masa depan dalam hubungan ekonomi - masyarakat. Dalam studi Myung-Koo Kang (2018), dari aspek *financial system* Korea Selatan telah menyimpang secara drastis sejak awal tahun 1980-an dan beralih ke model AS, yang sering dianggap sebagai sistem keuangan yang lebih berorientasi pasar, tetapi mereka bisa mengatasi

masalah ketimpangan pendapatan (*income inequality*). Model ini cocok dengan visi ekonomi Indonesia, mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur. Menurut Myung-Koo Kang, Korea Selatan bisa karena transformasi yang dilakukan adalah transformasi multiaspek, termasuk struktur umur, struktur lapangan kerja dan struktur upah, serta distribusi lahan pertanian, yang mereka lakukan secara konsisten sejak 1963. Studi yang dilakukan Iskan dan Lin (2021) menemukan bahwa distribusi awal lahan pertanian yang relatif merata akibat reformasi lahan redistribusi ekstensif yang dilakukan pada tahun 1950an secara signifikan mengurangi ketimpangan pendapatan yang terjadi setelahnya. Perubahan struktural melalui realokasi tenaga kerja keluar dari sektor pertanian berkontribusi terhadap meningkatnya ketimpangan pendapatan. Dan, semakin besarnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di sektor non-pertanian dan semakin rendahnya jumlah penduduk usia kerja akan mengurangi ketimpangan pendapatan rumah tangga.

Selain Korea Selatan, Vietnam juga contoh baik bagi Indonesia. Sebuah studi yang dilakukan oleh Sarma, Paul, dan Wan (2017) yang diterbitkan oleh Asean Development Bank – ADB (Working Paper No. : 681), mencoba menjawab pertanyaan penelitian apakah transformasi struktural menyebabkan pertumbuhan

dan ketimpangan pendapatan di Vietnam. Dengan menggunakan tiga putaran Survei Standar Hidup Rumah Tangga Vietnam (2002, 2006, dan 2010), menunjukkan bahwa Vietnam terus mengalami transformasi dan pertumbuhan struktural yang berkelanjutan, namun pertumbuhan ini bersifat heterogen antar wilayah. Pertumbuhan ini menunjukkan keuntungan yang berpihak pada masyarakat kaya, dengan peningkatan keuntungan di bidang pertanian dan manufaktur hanya terjadi pada 10 hingga 20 persentil teratas. Penelitian ini juga menemukan bahwa pertumbuhan tersebut meningkatkan ketimpangan pendapatan di Vietnam, dan perubahan ketimpangan pendapatan bersifat heterogen antar wilayah. Perbedaan pertumbuhan dan ketimpangan pendapatan di Vietnam didorong oleh perbedaan laju industrialisasi antar wilayah dan dampak struktural seperti akses terhadap pelabuhan. Karena itu Sarma et al., merekomendasikan agar pemerintah Vietnam perlu mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif, akses terhadap kegiatan non-pertanian mungkin perlu ditingkatkan bagi rumah tangga yang tidak berada di wilayah dengan tingkat transformasi struktural yang tinggi.

Ketimpangan pendapatan antar wilayah di Indonesia juga merupakan tantangan yang harus diatasi. Fakta bahwa banyak daerah yang

kaya sumberdaya alam tetapi PDRB dan Indeks Kualitas Manusia atau IPM-nya rendah, begitu juga sebaliknya. Ini berarti, ada persoalan struktural yang terjadi disana dibandingkan dengan wilayah lain yang memiliki potret sebaliknya.

Bila melihat strategi pembangunan ekonomi pada tahun 2024, pemerintah mulai lebih fokus melakukan transformasi ekonomi. Ini terlihat dari tema kebijakan : *"APBN 2024 untuk mendorong transformasi ekonomi, menciptakan inklusivitas, dan sustainability"*. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan (sebagaimana dirilis di berbagai media), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berperan dalam merespons dinamika perekonomian, menjalankan agenda pembangunan, dan menyejahterakan masyarakat Indonesia yang ditunjukkan melalui berbagai kinerja perekonomian dan capaian pembangunan. Kebijakan fiskal dapat digunakan dalam mendorong inklusivitas dan mengakselerasi transformasi ekonomi untuk meningkatkan sustainabilitas. Hal tersebut sejalan dengan tujuan jangka menengah panjang untuk mencapai visi Indonesia maju di tahun 2045, di mana fokus terhadap *human capital*, infrastruktur, dan institusi sebagai poros untuk memperbaiki produktivitas dan juga untuk meningkatkan nilai tambah tanpa mengorbankan sustainabilitas.

Dapat kita simpulkan bahwa Indonesia sedang melakukan transformasi ekonomi untuk mencapai visi Indonesia maju di tahun 2045. Tentu yang dibutuhkan untuk proses transformasi ini berjalan baik adalah konsolidasi politik dan demokrasi. Tantangannya cukup berat, kita tidak saja sedang merubah struktur ekonomi, tetapi juga merubah politik dan struktur sosial. Kita tidak saja memperkuat aset fisik, tetapi juga aset manusia. Peraih hadiah Nobel Joseph E. Stiglitz, dalam sebuah artikelnya berjudul *'Beyond GDP'* (2018), mengawali tulisannya dengan kalimat : *"What we measure affects what we do. If we focus only on material wellbeing – on, say, the production of goods, rather than on health, education, and the environment – we become distorted in the same way that these measures are distorted; we become more materialistic"*. Pada bagian akhir tulisannya, Stiglitz menutup dengan kalimat : *"The Beyond GDP measurement agenda will continue to play a critical role in helping us achieve these crucial goals"*. Nasehat Stiglitz ini menginspirasi kita untuk melakukan transformasi ekonomi Indonesia dan membuat kebijakan-kebijakan yang tidak saja benar (*good*), tetapi juga patut (*proper*). **Demikian editorial, selamat membaca.**

DAFTAR ISI

FOKUS

- 7** Mendulang Transformasi Ekonomi Melalui Kawasan Ekonomi Khusus
- 11** Dukungan Perpajakan untuk Transformasi Ekonomi Indonesia Demi Masyarakat Indonesia yang Lebih Sejahtera
- 17** Merancang Ulang Kebijakan Ekonomi yang Memaksimalkan Keadilan: Dari *Good Policy* menjadi *Proper Policy*
- 24** Film dan Pariwisata, Potensi Ekonomi melalui Kolaborasi dan Sinergi

ANALISIS

- 28** Anak Terlindungi - Indonesia Maju
- 31** Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian (*Track Access Charge/TAC*): Telaah PMK No. 138 Tahun 2021
- 35** Mampukah *Alternative Credit Scoring* Meningkatkan Akses Pembiayaan UMKM?

WAWANCARA

- 41** Hilirisasi untuk Percepatan Transformasi

44 INSPIRASI, SERBA-SERBI, RENUNGAN

55 FISKALISTA, RESENSI, GLOSARIUM



Mendukung Transformasi Ekonomi Melalui Kawasan Ekonomi Khusus

Yanuar Widiyanto²

Salah satu kebijakan untuk menciptakan aglomerasi adalah membentuk kawasan khusus perekonomian di suatu daerah. Negara berkembang cenderung membentuk suatu kawasan perekonomian baru karena diharapkan mampu berperan dalam mengembangkan potensi ekonomi di suatu daerah sehingga tercipta pusat-pusat ekonomi baru. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan tersebut disertai dengan penguatan konektivitas antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan antara pusat pertumbuhan ekonomi dengan lokasi kegiatan ekonomi serta infrastruktur pendukungnya. Secara keseluruhan, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan konektivitas tersebut menciptakan koridor ekonomi. Pembangunan

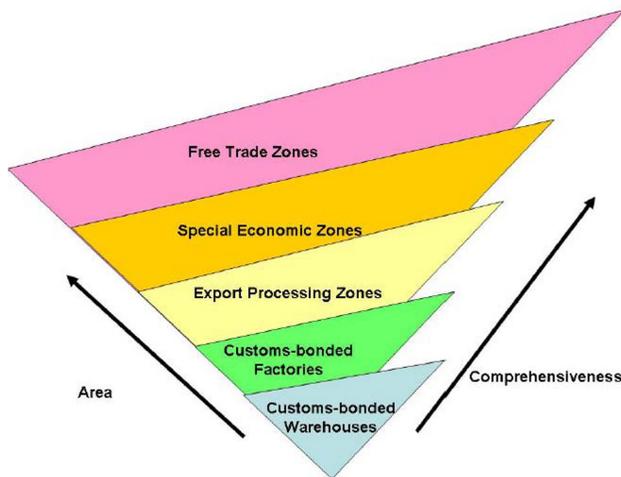
koridor ekonomi ini juga dapat diartikan sebagai pengembangan wilayah untuk menciptakan dan memberdayakan basis ekonomi terpadu dan kompetitif serta berkelanjutan. Webber (1929) menyebutkan bahwa untuk menentukan lokasi industri perlu dilakukan evaluasi berdasarkan pada biaya transportasi, ketersediaan pekerja dengan upah murah, dan aglomerasi yang menjamin kedekatannya dengan pasar serta dukungan dari perusahaan lokal. Salah satu daya tarik lokasi industri adalah keberadaan klaster industri, yaitu berkumpulnya berbagai industri dengan berbagai institusi, seperti universitas dan unit pelayanan pemerintahan (Porter, 2008).

Bentuk kawasan khusus perekonomian di berbagai

negara umumnya berbeda-beda. India mengembangkan konsep kawasan khusus perekonomian dengan membentuk *Export Processing Zone (EPZ)* pada tahun 1965 (Wall, 1976). Pada 1969, Filipina mengikuti jejak India dengan membentuk EPZ (Takeo, 1978). China pada era 1980 membentuk EPZ dengan tujuan untuk melakukan pengujian implementasi kapitalisme pada suatu wilayah yang terbatas (Leong, 2004). Sedangkan, Thailand mengembangkan kawasan khusus perekonomian dengan membentuk *Free Commercial Zone (FCZ)* dan *Free Industrial Zone (FIZ)* pada 1991 (Takeo, 1978). Wong et al., (1984) menyatakan bahwa kawasan khusus perekonomian memiliki beberapa tipe tergantung dari besaran area maupun

²Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Kebijakan Fiskal

Gambar 1. Jenis-Jenis Kawasan Khusus Perekonomian



Sumber: Wong et al., (1984)

tingkat komprehensifnya yaitu *customs bonded warehouses*, *custom bonded factories*, *export processing zone*, *special economic zones*, dan *free trade zones* sesuai Gambar 1.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Melalui Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, KEK didefinisikan sebagai kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. KEK di Indonesia dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki

nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. KEK dapat terdiri dari satu atau beberapa zona yaitu zona pengolahan ekspor, zona logistik, zona industri, zona pengembangan teknologi, zona pariwisata, zona energi, dan zona ekonomi lain. Hal ini relevan dengan teori ekonomi klasik yang antara lain dipelopori David Ricardo pada abad ke-19, setiap negara diajarkan untuk berdagang barang dan jasa yang mempunyai keunggulan komparatif dimana dapat dihasilkan secara lebih efisien dibandingkan negara lain.

Studi Nel dan Rogerson pada 2013 berpendapat bahwa mayoritas KEK dibentuk di daerah dekat pelabuhan daripada di daerah pedalaman. Hal ini relevan dengan KEK di Indonesia yang didukung dengan hub transportasi seperti pelabuhan, stasiun kereta api, dan bandara. Tercatat terdapat sembilan KEK

yang didukung infrastruktur pelabuhan, yaitu KEK Sei Mangkei, KEK Tanjung Lesung, KEK Palu, KEK Bitung, KEK Tanjung Api-Api, KEK Morotai, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), KEK Tanjung Kelayang, dan KEK Sorong. Untuk KEK yang didukung transportasi kereta api, tercatat ada lima kawasan yaitu KEK Sei Mangkei, KEK Tanjung Lesung, KEK Palu, KEK Bitung, dan KEK Tanjung Api-Api. Adapun KEK yang didukung dengan infrastruktur bandara antara lain KEK Tanjung Lesung, KEK Mandalika, KEK Bitung, KEK Morotai, KEK Tanjung Kelayang, dan KEK Sorong. Seluruh dukungan infrastruktur bagi KEK ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas KEK dimana diharapkan akan berdampak riil pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada perkembangannya, Indonesia membentuk KEK tidak hanya menekankan pada akselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah dan pemerataan pembangunan secara nasional (KEK Generasi 1), namun disesuaikan juga dengan dinamika ekonomi dan teknologi dunia yang mampu membangun nilai tambah atas penguasaan teknologi dan sumber daya manusia (KEK Generasi 2). KEK Generasi 2 diwujudkan dengan pengembangan KEK Kesehatan, KEK Pendidikan, KEK Ekonomi Digital dan KEK *Maintenance Repair and Overhaul*.

Katalisator Transformasi Ekonomi

Dikutip dari laporan Dewan Nasional KEK tahun 2021, realisasi investasi KEK di 19 wilayah mencapai Rp 76,75T dengan melibatkan 179 pelaku usaha di 21 sektor lapangan usaha. Investasi tersebut setidaknya mampu menyerap 28.984 pekerja dan menyumbang nilai ekspor sebesar Rp 9,38T pada tahun 2021. Berdasarkan Tinjauan Ekonomi, Keuangan, dan Fiskal edisi II tahun 2023, disebutkan bahwa rata-rata dampak dari 19 KEK terhadap lapangan usaha sektor industri pengolahan di provinsi terkait sebesar 0,47%, sedangkan dampaknya terhadap lapangan usaha sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan sebesar 0,03%. *Gap* yang cukup signifikan di kedua sektor ini dapat dibaca secara implisit bahwa KEK dapat mendorong adanya transformasi struktural.

Masih mengukur dampak KEK terhadap transformasi struktural, studi Possebom tahun 2017 menyimpulkan bahwa KEK mampu meningkatkan *share* persentase PDRB sektor industri pengolahan. Begitu juga studi kuantitatif yang dilakukan penulis pada tahun 2021 menemukan adanya dampak positif yang ditimbulkan KEK di Indonesia terhadap transformasi struktural. Hal ini diindikasikan dengan meningkatnya *share* persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

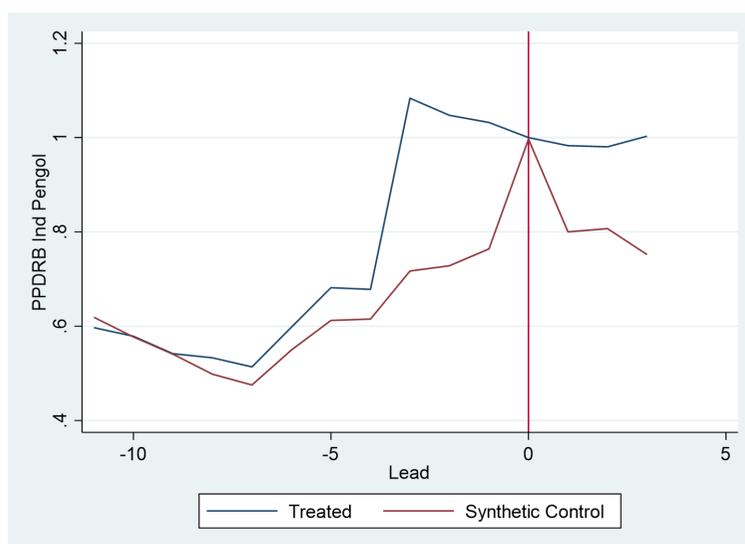
sektor industri pengolahan di kesembilan daerah KEK sebesar 0,607%. Studi ini mengelompokkan KEK yang mempunyai persamaan industri utama di sektor industri pengolahan untuk dianalisis dampaknya terhadap *share* persentase PDRB sektor industri pengolahan dan sektor pertanian. Analisis ini digunakan untuk mengetahui dampak keberadaan KEK terhadap proses transformasi struktural, dimana sektor industri pengolahan mewakili sektor perekonomian sekunder dan sektor pertanian mewakili sektor perekonomian primer.

Delapan KEK yang dianalisis adalah KEK Sei Mangke, KEK Palu, KEK Bitung, KEK Morotai, KEK MBTK, KEK Sorong, KEK Tanjung Kelayang, KEK Galang Batang, dan KEK Arun Lhokseumawe. Sedangkan, metode

analisis yang digunakan adalah Synthetic Control Method yang diperkenalkan pada penelitian Abadie & Gardeazabal (2003), Abadie et al., (2010), dan Abadie et al., (2015). Synthetic Control Method mengumpulkan sejumlah unit yang sebanding dan menggunakan metode berbasis data untuk menghasilkan versi sintesis dari unit yang dibangun dengan rata-rata bobot dari semua unit pembanding potensial yang paling menyerupai karakteristik unit yang dibangun (Abadie & Gardeazabal 2003, Abadie et al., 2010, Abadie et al., 2015).

Gambar 2 menunjukkan nilai *share* persentase PDRB sektor industri pengolahan untuk kabupaten/kota yang memiliki KEK dan kabupaten/kota *synthetic control* selama periode 2000-2019. Terlihat jelas bahwa sintesis kabupaten/kota yang

Gambar 2. Tren Share Persentase PDRB Sektor Industri Pengolahan Keseluruhan KEK Sektor Utama Industri Pengolahan vs Synthetic Control



Sumber: Hasil analisis Penulis, 2021

memiliki KEK tidak secara dekat mengikuti kurva *share* persentase PDRB sektor industri pengolahan di kabupaten/kota yang memiliki KEK untuk hampir seluruh periode pra-perlakuan. Walaupun begitu, pada awal periode 2000 dan 2017 kurva yang dibentuk *synthetic control* cukup dekat. Setelah pembentukan KEK tahun 2017, sintetis menyimpang dari kabupaten/kota yang memiliki KEK, membuat tren menurun, sedangkan kabupaten/kota yang memiliki KEK menunjukkan arah sebaliknya. Pada akhir periode pengamatan, ketidaksesuaian antara kedua jalur tersebut menunjukkan dampak positif yang substansial dari penerapan kebijakan KEK.

Gambar 3 menggambarkan nilai *share* persentase PDRB sektor pertanian untuk kabupaten/kota yang memiliki KEK di daerahnya

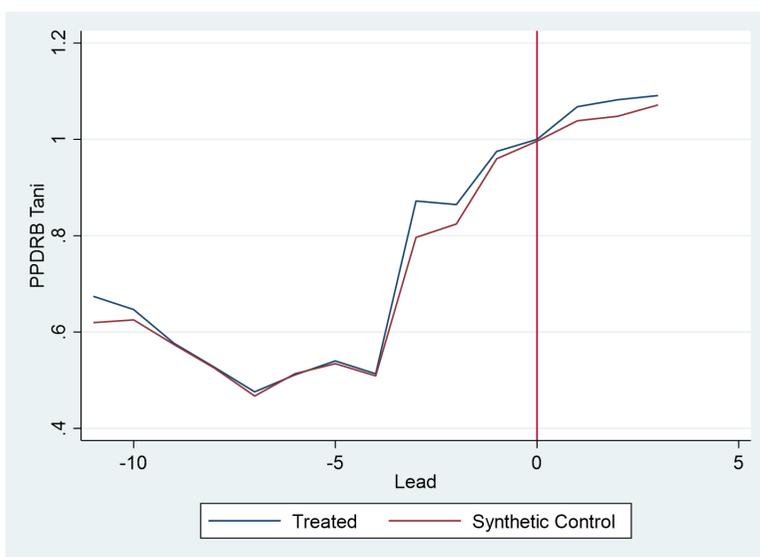
dan kabupaten/kota yang merupakan sintetiknya selama periode 2000–2019. Tampak bahwa sintetis kabupaten/kota yang memiliki KEK secara rata-rata berada didekat kurva kabupaten/kota yang memiliki KEK untuk seluruh periode *pre-treatment*. Setelah pembentukan KEK, sintetis kabupaten/kota yang memiliki KEK tetap beriringan dengan kabupaten/kota yang memiliki KEK yang sebenarnya. Tren yang dihasilkan kabupaten/kota yang memiliki KEK tampak menurun, sedangkan tren yang dihasilkan sintetis kabupaten/kota yang memiliki KEK meningkat.

Dampak yang dihasilkan signifikan terhadap *share* persentase PDRB sektor industri pengolahan dan tidak signifikan terhadap *share* persentase PDRB sektor pertanian. Sehingga hasil studi ini cukup dapat

membuktikan adanya transformasi struktural dari dampak keberadaan KEK di Indonesia.

Dampak keberadaan KEK yang cenderung positif dalam jangka panjang dapat menjadi acuan Pemerintah untuk meneruskan dan menyempurnakan kebijakan KEK sehingga dapat berdampak signifikan pada kesejahteraan dan perekonomian di masa depan. Pengembangan KEK Generasi 2 diharapkan selaras dengan langkah optimalisasi bonus demografi yang akan dialami Indonesia. Puncak bonus demografi Indonesia yang diperkirakan terjadi sekitar tahun 2030 perlu diisi dengan tenaga kerja yang terampil disertai lapangan pekerjaan yang memadai. Sinkronisasi kebijakan dan sinergi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam mengidentifikasi potensi perekonomian suatu daerah berperan penting sehingga Pemerintah dapat secara tepat menentukan jenis zona industri bagi KEK yang akan dibentuk di suatu daerah. Pada akhirnya, keberadaan KEK beserta infrastrukturnya terbukti mampu berdampak positif pada proses transformasi struktural. Walaupun, Pemerintah harus berhati-hati agar dalam jangka panjang dampak keberadaan KEK akan semakin signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 3. Tren Share Persentase PDRB Sektor Pertanian Keseluruhan KEK Sektor Utama Industri Pengolahan vs Synthetic Control



Sumber: Hasil analisis Penulis, 2021



Dukungan Perpajakan untuk Transformasi Ekonomi Indonesia demi Masyarakat Indonesia yang Lebih Sejahtera

Hadi Setiawan³, Rustam Efendi⁴ dan Satya Tamyawan⁵

Salah satu kunci yang harus dilakukan untuk mencapai Indonesia Maju tahun 2045 adalah melakukan transformasi ekonomi sejak saat ini. Transformasi perlu diarahkan untuk mendorong penciptaan nilai tambah dan produktivitas yang lebih tinggi, penguatan sektor ekonomi yang lebih ramah lingkungan, dan tentunya mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Transformasi ekonomi juga diarahkan agar

memiliki daya saing yang baik serta mampu berpartisipasi lebih besar lagi dalam rantai pasok dunia. Transformasi ekonomi merupakan suatu keniscayaan, mengingat Indonesia menghadapi beberapa tantangan yang antara lain, dampak perubahan iklim, kondisi geopolitik dunia, dan adanya gangguan pasokan terutama di sektor energi dan pangan.

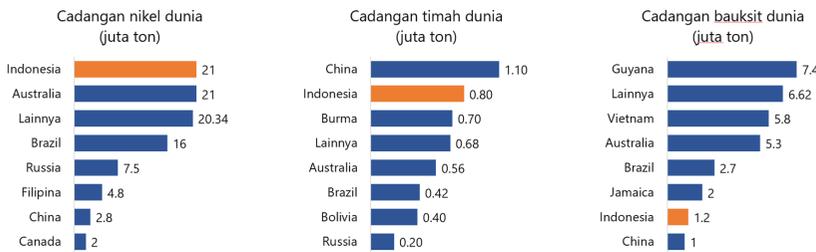
Salah satu upaya dalam transformasi ekonomi yaitu melalui dorongan hilirisasi

sektor SDA. Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk hal tersebut, khususnya untuk hilirisasi hasil sumber daya alam, seperti nikel, timah ataupun bauksit. Apalagi Indonesia merupakan negara yang memiliki cadangan sumber daya alam yang cukup besar di dunia untuk ketiga produk tersebut (gambar 1). Oleh karena itu hilirisasi atas sumber daya alam tersebut wajib dilakukan oleh Indonesia.

^{3,4}Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Badan Kebijakan Fiskal

⁵Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kebijakan Fiskal

Gambar 1. Perbandingan Cadangan Beberapa Sumber Daya Mineral Dunia



Sumber: USGS, 2022 dalam BKF (2023)

Transformasi ekonomi melalui hilirisasi sumber daya mineral diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai *channel*, seperti penciptaan aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi, penguatan posisi Indonesia dalam rantai pasok global, dan diversifikasi perekonomian Indonesia sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada volatilitas pasar komoditas global. Lebih lanjut, hilirisasi juga akan meningkatkan resiliensi dalam menghadapi guncangan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, menghasilkan *multiplier* ekonomi baik pada sektor hilir maupun pertumbuhan kegiatan ekonomi di daerah industri dan sekitarnya, transfer teknologi dan inovasi, dan peningkatan penerimaan negara (BKF, 2023).

Proses hilirisasi yang dilakukan oleh Indonesia terbukti mampu memberikan dampak-dampak positif bagi perekonomian Indonesia secara nasional maupun di daerah. Hilirisasi nikel contohnya, memberikan

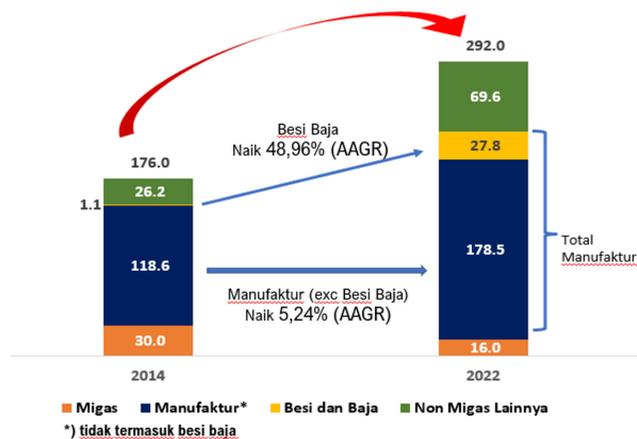
dampak nyata berupa antara lain kenaikan ekspor Indonesia untuk produk besi baja. Jika pada tahun 2014 nilai ekspor besi baja Indonesia baru mencapai USD 1,1 miliar, maka pada tahun 2022 sudah menjadi USD 27.8 miliar atau naik sebesar 24,3 kali lipat dalam 8 tahun. Nilai ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan kenaikan ekspor dari sektor lainnya (gambar 2).

Untuk produk nikel, hilirisasi sudah dimulai sejak tahun 2012, yaitu dengan

mengenakan Bea Keluar sebesar 20%. Kebijakan ini kemudian diperkuat dengan adanya larangan ekspor untuk bijih nikel pada tahun 2014. Walaupun kemudian pada tahun 2017 terdapat relaksasi, bijih nikel menjadi kembali boleh di ekspor dengan tarif Bea Keluar sebesar 10%. Tetapi pemerintah menegaskan komitmennya untuk hilirisasi dengan kembali melarang ekspor bijih nikel pada tahun 2020 sampai dengan sekarang.

Dampak nyata lainnya adalah pada penyerapan tenaga kerja. Terdapat 76 ribu penyerapan tenaga kerja baru di dua provinsi penghasil nikel dan pabrik *smelter* yaitu Sulawesi Tengah dan Maluku Utara, dan sekitar 26 ribu tenaga kerja baru tercipta di provinsi penghasil nikel lainnya (BKF, 2023). Selain itu, hilirisasi nikel juga berhasil menaikkan PDRB Sulawesi Tengah rata-rata sebesar Rp111,1 triliun per

Gambar 2. Perbandingan Ekspor 2014 dan 2022 (USD Miliar)



Sumber: BKF (2023)

tahun selama periode 2020 – 2022 atau tumbuh sebesar 11,7% (yoy) di tahun 2021 dan 15,2% (yoy) di tahun 2022. Peningkatan tersebut, utamanya disebabkan oleh kontribusi industri logam dasar yang ditunjukkan dengan peningkatan kontribusi industri logam dasar terhadap PDRB Sulawesi Tengah yang sangat besar, dari 2,6% di tahun 2015 menjadi 33,7% di tahun 2022. Hal yang sama terjadi di Propinsi Maluku Utara, kebijakan hilirisasi nikel berhasil meningkatkan pertumbuhan PDRB Maluku Utara sebesar 24% (yoy) di tahun 2021 dan 35,1% (yoy) di tahun 2022. Hal ini juga didorong oleh peningkatan kontribusi industri logam dasar terhadap PDRD yang meningkat sangat pesat, dari 8,3% di tahun 2020 menjadi 27,5% di tahun 2022.

Dampak-dampak positif kebijakan hilirisasi Indonesia tersebut dicapai salah satunya melalui upaya

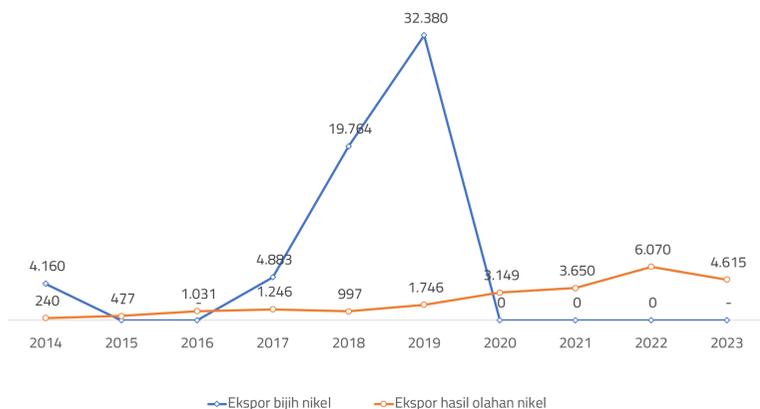
pelarangan ekspor nikel mentah sejak tahun 2020. Sejak pelarangan tersebut ekspor hasil olahan nikel berangsur meningkat (Gambar 3). Hal tersebut juga didorong dengan berbagai insentif perpajakan yang diberikan untuk mendorong pembangunan smelter yang merupakan konsekuensi dari dilarangnya ekspor nikel mentah agar bijih nikel dapat diolah lebih lanjut di dalam negeri. Dukungan perpajakan tersebut diberikan dalam bentuk berbagai insentif, yaitu:

1. Pemberian insentif *Tax Holiday* untuk Industri logam dasar yang menghasilkan logam nikel dari bijih nikel dengan menggunakan proses *pyrometallurgy* atau proses *hydrometallurgy*;
2. Pemberian insentif *Tax Allowance* untuk:
 - Pertambangan bijih nikel yang melakukan pengolahan dan/atau

pemurnian bijih nikel,

- Industri pembuatan logam dasar bukan besi yang melakukan alih teknologi;
3. PPN dibebaskan atas impor dan perolehan barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik untuk industri smelter;
 4. Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal;
 5. PPN dibebaskan atas barang tambang termasuk bijih nikel sebagai bahan baku pembuatan baterai;
 6. Fasilitas *Super Deduction Tax* hingga 300% atas biaya penelitian dan pengembangan di bidang logam dasar bukan besi; dan
 7. Fasilitas *Super Deduction tax* hingga 200% atas kegiatan vokasi.

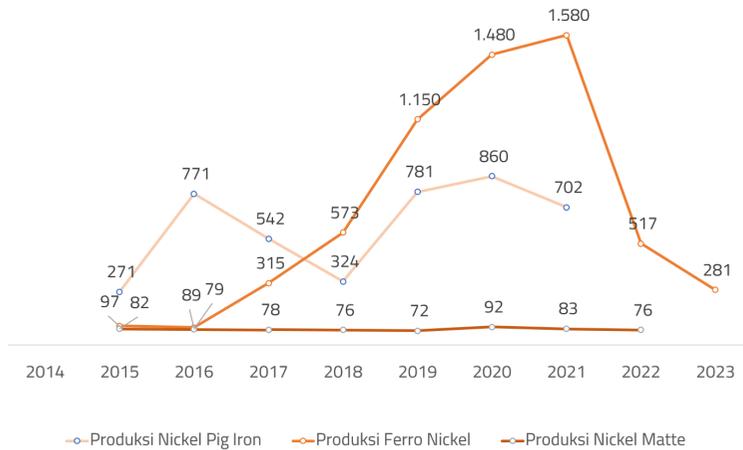
Gambar 3. Ekspor Nikel (Ribu Ton)



Sumber: BPS, diolah

Hilirisasi nikel yang dilakukan oleh Indonesia tidak hanya sebatas sampai dengan pengolahan bijih nikel menjadi produk-produk turunan tingkat 1 atau tingkat 2 saja seperti Nickel Pig Iron, Ferro Nickel, ataupun Nickel Matte, melainkan bertujuan sampai dengan penciptaan produk akhirnya yaitu kendaraan listrik. Kenaikan produksi hasil olahan bijih

Gambar 4. Produksi Hasil Olahan Nikel (Ribuan Ton)



Sumber: BPS, diolah

nikel tersebut (Gambar 4) kemudian diharapkan dapat memasok kebutuhan bahan baku industri baterai kendaraan listrik atau *electric vehicle* (EV) di dalam negeri. Sebagaimana diketahui bahwa nikel menjadi salah satu komponen utama dalam bahan baku pembuatan baterai kendaraan listrik, dimana baterai merupakan komponen utama di sebuah kendaraan listrik. Oleh karena itu untuk kasus hilirisasi nikel, Pemerintah ingin menciptakan suatu ekosistem yang tidak hanya di bagian hulu saja melainkan sampai ke hilirnya. Insentif perpajakan yang diberikan juga didesain dapat meliputi keseluruhan ekosistem tersebut, yaitu dari mulai bagian tambang dan smelternya, kebutuhan komponen-komponen baterainya, kendaraan listriknya, *charging station*-nya, hingga proses *recycling* terhadap produk bekasnya (Gambar 5).

Atas kendaraan listrik sendiri, apabila dirinci, maka

Pemerintah telah memberikan insentif baik dari sisi *supply* maupun *demand*-nya. Insentif tersebut berupa:

1. **Dari sisi *supply***, Pemerintah telah memberikan insentif perpajakan yang meliputi:

- * *Tax Holiday* hingga 20 tahun (sesuai nilai investasinya) untuk:
 - Industri kendaraan listrik roda empat atau lebih yang terintegrasi dengan baterai dan motor listrik;
 - Industri baterai untuk kendaraan bermotor listrik roda empat atau lebih;
 - Industri motor listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda empat atau lebih;
 - Industri *power control unit* (PCU) listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda empat atau lebih;
 - Industri kendaraan

listrik roda dua atau tiga;

- Industri baterai untuk kendaraan bermotor listrik roda dua atau roda tiga;
- Industri motor listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda dua atau roda tiga; dan
- Industri *power control unit* (PCU) listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda dua atau tiga.

* *Tax Allowance* untuk industri kendaraan bermotor selain yang telah mendapatkan *Tax Holiday*.

* *Super Deduction* hingga 300% atas biaya penelitian dan pengembangan di bidang pembangkit tenaga listrik, baterai, dan alat kelistrikan.

* PPN dibebaskan atas barang tambang termasuk bijih nikel sebagai bahan baku pembuatan baterai.

* PPN dibebaskan atas impor dan perolehan barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik untuk industri Kendaraan Bermotor.

* Tarif PPnBM untuk mobil listrik dalam negeri peserta yang mengikuti program Kemenperin sebesar 0%. Sementara tarif PPnBM kendaraan konvensional minimal 15% s.d 95% (sesuai konsumsi BBM/emisi yang dikeluarkan dan volume mesin).

- * Bea Masuk MFN impor mobil *incompletely knocked down* (IKD) 0% dan Bea Masuk impor *completely knocked down* (CKD) 0% (melalui beberapa kerjasama FTA/CEPA termasuk Korea dan China).
- * Insentif pajak daerah berupa pengurangan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) dan pajak kendaraan bermotor (PKB) sampai dengan 100%.
- * Perkembangan terakhir juga menyebutkan bahwa Pemerintah sedang berencana memberikan insentif tambahan produsen EV berupa PPnBM 0% dan Bea Masuk 0%, serta penyesuaian TKDN untuk CBU dengan kuota impor tertentu. Hal ini diharapkan dapat semakin mendorong produsen EV untuk membangun pabrik EV dan memproduksi mobil EV di Indonesia.

2. Dari sisi demand, Pemerintah memberikan dukungan tambahan berupa:

- * Bantuan pemerintah untuk motor listrik baru/motor konversi sebesar Rp7 juta per unit untuk 1 juta unit selama 2 tahun (2023 dan 2024) dengan alokasi anggaran sebesar Rp7 triliun. Bantuan tersebut diberikan kepada:
 - Motor yang diproduksi di Indonesia dengan TKDN minimal 40%;

- Tahun 2023 diberikan untuk 50 ribu unit (motor hasil konversi) dan 200 ribu unit (motor baru) dan tahun 2024 untuk 150 ribu unit (motor hasil konversi) dan 600 ribu (motor baru);
- Target penerima diutamakan untuk UMKM dalam rangka mendorong produktivitas dan efisiensi usaha;
- Dalam rangka efektivitas kebijakan, target penerima akan diubah menjadi 1 NIK satu motor (sedang dalam proses revisi Permenperin).
- * Fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk mobil listrik dan bus listrik di tahun 2023 dengan alokasi anggaran Rp1,7 triliun, diberikan untuk:

- Mobil listrik dengan TKDN ≥ 40% diberikan insentif PPN DTP 10% (PPN dibayar 1%);
- Bus listrik dengan TKDN ≥ 40% diberikan insentif PPN DTP 10% (PPN dibayar 1%), sementara TKDN 20% s.d. <40% dan dirakit di Indonesia akan diberikan insentif PPN DTP 5% (PPN dibayar 6%);
- * Dalam rangka menjaga likuiditas dealer mobil listrik, akan ditambahkan pengaturan restitusi dipercepat yang saat ini pengaturannya dalam tahap finalisasi.

Pertanyaan selanjutnya yang muncul yaitu apakah dengan banyaknya insentif akan menggerus penerimaan negara?. Berdasarkan data yang ada, ternyata yang terjadi adalah sebaliknya.

Gambar 5. Insentif Perpajakan Hilirisasi Nikel dan Ekosistem Kendaraan Listrik

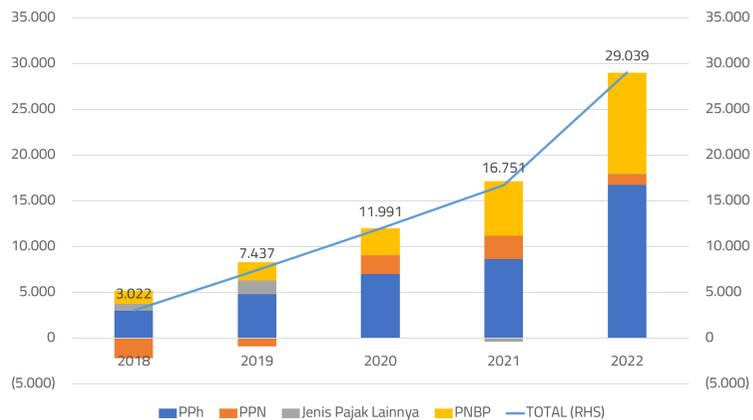
	Mining & Refinery Saprolite, Ferronickel	Material baterai	Battery cell, battery pack	Mobil	Kendaraan Listrik Motor	Konversi	Charging Station	Recycling
Tax Holiday	v		v	v	v			
Tax Allowance	v		v	v	v			
Bea masuk dibebaskan Mesin & bahan baku	v	v	v	v	v	v	v	v
PPN dibebaskan Mesin & Peralatan	v	v	v	v	v	v	v	v
Superdeduction R&D	v			v	v			
Superdeduction Vokasi	v			v	v			
Bea Masuk IKD				0%	-			
Bea Masuk CKD				0% melalui beberapa FTA/CEPA	0% melalui beberapa FTA/CEPA			
PPnBM				0%	Bukan objek	Bukan objek		
PPN				1% (DTP 10%, 2023)				
Bantuan pembelian					Rp7 juta/unit (2023)	Rp7 juta/unit (2023)		
BBNKB				0%	0%	-		
PKB				0%	0%	-		

Sumber: BKF (2023)

Kebijakan hilirisasi nikel yang dibarengi dengan pemberian insentif perpajakan ternyata berhasil meningkatkan penerimaan negara, baik dari perpajakan maupun PNB. Total penerimaan negara meningkat sebesar 9,6 kali lipat dari tahun 2018 ke tahun 2022 atau dari sebesar Rp3 triliun pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp29 triliun di tahun 2022 pada sektor Nikel dan turunannya (Gambar 6). Adapun perinciannya adalah sebagai berikut (DJP dan DJA, 2023):

- a. Penerimaan pajak dari sektor dengan KBLI 24202 (sektor industri logam dasar bukan besi) meningkat **22,25 kali** lipat dari tahun 2018 ke tahun 2022, yaitu dari Rp807 miliar menjadi Rp18 triliun.
- b. Jika dilihat lebih dalam, maka semua jenis pajak meningkat cukup signifikan, seperti PPh meningkat sebanyak **5,6 kali lipat**, yang antara lain terdiri dari PPh Badan meningkat **5 kali lipat**, PPh Pasal 21 meningkat **3,7 kali lipat**, dan PPh Pasal 26 meningkat **47 kali lipat**. Bahkan jenis pajak PPN, yang sebelumnya minus Rp2,2 triliun (pada tahun 2018), sudah menjadi positif Rp1,2 triliun di tahun 2022.
- c. PNB royalti nikel naik sebesar 7,7 kali lipat,

Gambar 6. Penerimaan Negara dari Sektor Nikel dan turunannya tahun 2018-2022 (dalam miliar rupiah)

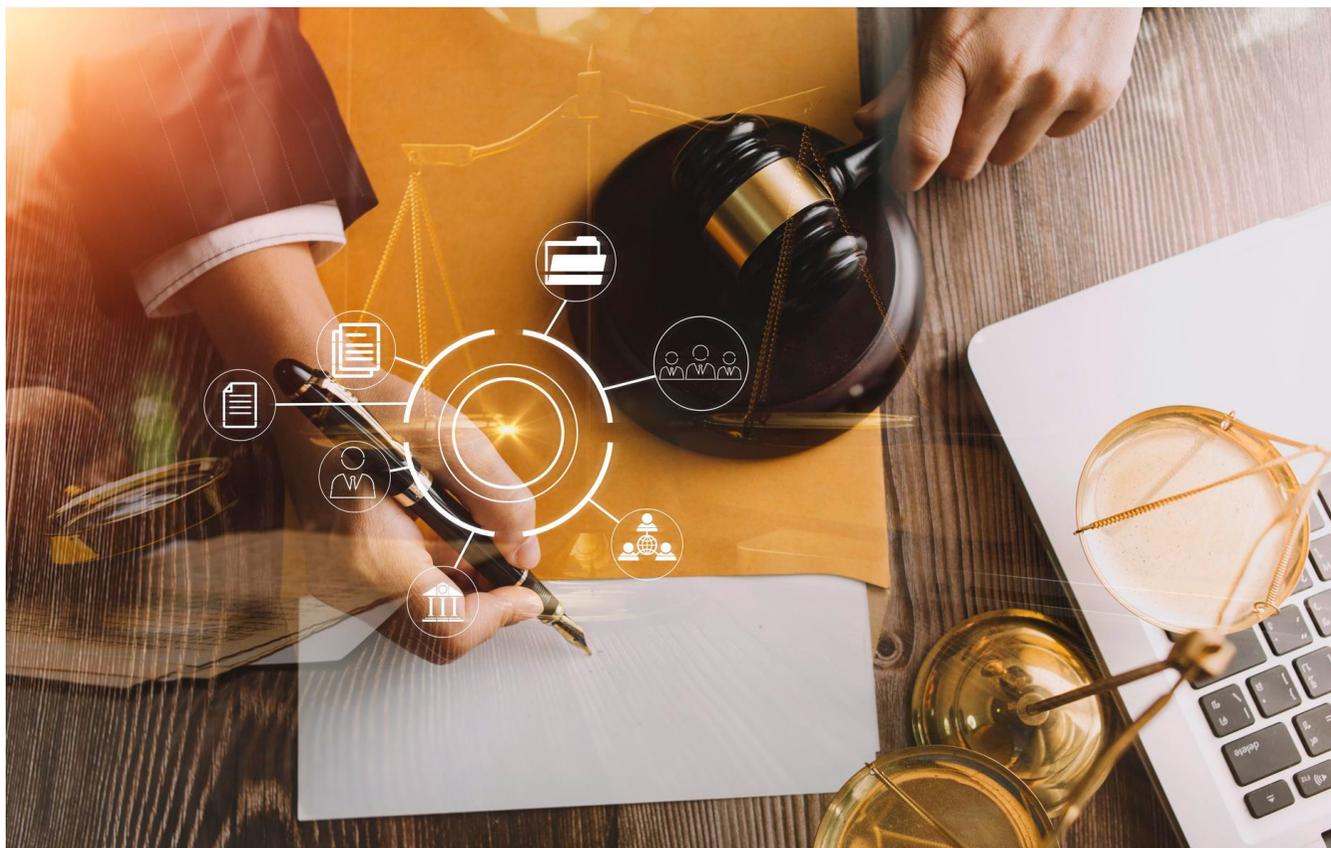


Sumber: DJA dan DJP, 2023 dalam BKF (2023)

- d. dari hanya sebesar Rp1,4 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp11,1 triliun pada tahun 2022.
- d. Sedangkan untuk penerimaannya mengalami penurunan setelah puncak penerimaan terjadi di tahun 2019 sebesar Rp1,4 triliun dan turun menjadi Rp66 juta pada tahun 2020 karena adanya pelarangan ekspor bijih nikel. Meskipun demikian secara total penerimaan negara tetap meningkat.

Data-data yang penulis sampaikan di atas menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi mempunyai manfaat yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia, yang dibuktikan dengan adanya

kenaikan ekspor, penambahan penyerapan tenaga kerja, kenaikan PDRB di Propinsi yang menghasilkan nikel dan melakukan hilirisasi, serta penambahan penerimaan negara yang tentu saja dampak akhirnya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu sudah sepantasnya kita semua mendukung kebijakan ini, termasuk dukungan dari sisi insentif perpajakannya.



Merancang Ulang Kebijakan Ekonomi yang Memaksimalkan Keadilan : Dari *Good Policy* menjadi *Proper Policy*

Syahrir Ika⁶

Persaingan ekonomi global yang kian ketat membuat potensi krisis ekonomi dan keuangan global akan lebih sering terjadi dengan jarak krisis yang makin mendekat, sehingga setiap negara harus memperkuat fondasi atau pilar ekonominya. Kita menyaksikan krisis demi krisis muncul mulai dari krisis Asia tahun 1997, kemudian krisis *subprime mortgage*

di AS tahun 2008, yang berdampak pada krisis utang negara-negara di kawasan Eropa tahun 2010, hingga krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2019. Indonesia mampu melewati krisis-krisis ini, tetapi proses pemulihannya berjalan kurang optimal.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir memang

cukup tinggi, yaitu rata-rata di angka 5 persen per tahun. Akan tetapi, kemakmuran yang berkeadilan masih sulit sekali terwujud. Pergantian pemerintahan setiap lima tahun telah mendorong ditempuhnya banyak strategi dan kebijakan di bidang ekonomi, namun capaian kerja ekonomi masih berada dalam 'taraf sedang-rendah'. Kita belum berani mendayung lebih cepat dengan mimpi

⁶Peneliti Ahli Utama BRIN/Ketua Umum Perhimpunan Periset Indonesia (PPI)

'pada taraf sedang-tinggi". Presiden baru Indonesia periode 2024-2029 dan presiden-presiden berikutnya harus menjawab tantangan ini, bagaimana meningkatkan derajat kemakmuran (*degree of prosperity*) dengan memperkuat pilar ekonomi Indonesia.

Pilar Ekonomi

Apa persoalan ekonomi Indonesia? Di saat mungkin Sebagian besar dari kita sangat paham apa jawaban pertanyaan ini, hal yang justru menjadi perhatian adalah pemahaman kita tentang pilar ekonomi inilah yang belum sama. Definisi pilar ekonomi seringkali kabur, akibatnya kebijakan yang diambil juga kurang pas, mungkin saja ekonomi berada dalam kondisi baik (*good*) tetapi dari sisi bertanggung jawab (*proper*) belum memadai. Padahal, penting dimaknai bahwa pilar ekonomi kuat hanya bila kondisinya memenuhi keduanya, yaitu baik dan bertanggung jawab.

Ketika pandemi Covid menjangkiti Indonesia yang kemudian sempat membuat ekonomi Indonesia goncang dan bahkan mengalami resesi dengan tumbuh minus 2,09 persen (*year on year*), itulah ujian bagi pilar ekonomi sebuah negara. Infrastruktur kesehatan masyarakat belum terbangun baik, imunitas ekonomi (*economic immunity*) menjadi lemah. Masyarakat tereduksi tentang apa arti dari resesi ekonomi (*economic*

recession), tetapi yang mereka butuhkan bukan definisinya, melainkan bagaimana bisa bertahan dari krisis, bahkan memanfaatkannya sebagai peluang. Hanya orang yang sehat dan siap sajalah yang bisa menikmati kemakmuran.

Secara teori, resesi ekonomi adalah kondisi ekonomi dimana terjadi penurunan tingkat ekonomi secara sementara dengan aktivitas di sektor perdagangan dan aktivitas industri yang kian berkurang. Para ahli ekonomi menyatakan resesi ekonomi terjadi ketika ekonomi suatu negara mengalami peningkatan dalam jumlah pengangguran, penurunan ritel, produk domestik bruto (PDB) yang negatif, dan terdapat kontraksi pendapatan dan manufaktur untuk jangka waktu yang lama maupun pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal berturut-turut. Definisi ini bisa ditelusuri dari pendapat para ahli ekonomi seperti Paul Samuelson dan Robert Solow, atau Milton Friedman dan Anna Schwartz atau juga dari Ben Bernanke (Mantan Ketua Federal Reserve) dalam buku atau artikel mereka masing-masing.

Kondisi (resesi) inilah yang dialami Indonesia pada tahun 2020 setelah diterpa pandemi Covid. Guncangan ekonomi (*economic shock*) yang mendadak akibat pandemi Covid, merupakan penyebab utama resesi ekonomi. Guncangan ekonomi terjadi karena ketidakseimbangan

antara produksi (*supply side*) dan konsumsi (*demand side*). Hampir semua negara mengalaminya, walau penyebabnya bisa berbeda-beda, begitu juga kedalaman resesi itu sendiri dan tingkat pemulihannya.

Krisis *subprime mortgage* di AS tahun 2007-2008 menyebabkan sebanyak 17 negara di kawasan eropa mengalami resesi. Guncangan ekonomi bisa terjadi secara tiba-tiba (*sudden*) sehingga setiap negara perlu memiliki strategi untuk memitigasinya agar rakyat selalu terlindungi. Karena itu, strategi yang utama adalah perkuat pilar-pilar ekonomi.

Bung Hatta mengatakan bahwa kalau ekonomi berpihak pada rakyat, maka pilar ekonomi menjadi kuat. Bunga Hatta menyebut ekonomi 'jalan lurus' yang kemudian dirumuskan dalam UUD 1945 Pasal 33. Bahwa yang dibangun adalah rakyat, bahwa pembangunan ekonomi adalah derivat dan pendukung pembangunan rakyat. Di dalam kehidupan ekonomi yang berlaku adalah "daulat-rakyat", bukan "daulat-pasar".

Menerjemahkan konsep 'daulat rakyat' ke dalam dimensi dan kebijakan ekonomi inilah yang menjadi tantangan para ekonom dan pimpinan bangsa ini. Daulat rakyat ini terlihat merupakan teori lama, tetapi sesungguhnya memiliki akurasi dan kemanfaatan tinggi dalam memperkuat pilar ekonomi suatu bangsa di era apapun. Daulat rakyat berarti

perekonomian meliputi seluruh wadah ekonomi, tidak saja badan usaha koperasi, tetapi juga meliputi badan usaha milik negara (BUMN) dan juga badan usaha milik swasta. Mereka hidup dengan cara saling mengikat, bukan saling meniadakan.

Efek dari ekonomi pasar, dimana modal sebagai raja atau pengatur ekonomi, maka yang terjadi adalah proses peniadaan, bukan proses penguatan antarsesama. Inilah kondisi riil yang terjadi di Indonesia sekaligus tantangan bagi siapa pun yang memimpin negeri ini. Banyak studi menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi Indonesia masih dalam kategori tinggi.

Rumus yang dipercaya para ekonom adalah "gini ratio atau koefisien gini". Bila koefisien gini mendekati angka 1 menggambarkan distribusi pendapatan yang tidak merata, ini menjadi pemicu utama terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin dan pengangguran tinggi. Para sosiolog menyebut ketimpangan pendapatan yang tinggi sebagai suatu keadaan dimana "ekonomi tidak berkeadilan", dan inilah indikator rapuhnya pilar ekonomi sebuah negara.

Pilar Keadilan Ekonomi

Dalam pesta demokrasi, terutama pemilihan Presiden, isu "ketidakadilan" selalu merupakan isu yang menarik yang memiliki energi kuat

untuk menarik dukungan pemilih. Dalam tataran konsep, rumus keadilan ekonomi adalah "kemakmuran yang berkeadilan (*equitable prosperity*)" atau "kemakmuran yang berkualitas (*quality prosperity*)". Kemakmuran bisa dicapai "dengan banyak cara", tetapi keadilan hanya dapat dicapai dengan kebijakan yang 'baik' (*good policy*) dan "kebijakan yang bertanggung jawab (*proper policy*).

Jadi, penguatan pilar ekonomi Indonesia dalam teori ekonomi dipahami oleh para ekonom dengan "bagaimana menggeser *Lorenz curve*, atau suatu representasi grafis yang dibangun oleh Max O. Lorenz di tahun 1905 mengenai distribusi pendapatan atau kekayaan, ke arah mendekati "*line of perfect equality*". Posisi ini tercapai ketika *Lorenz curve* membentuk 45 derajat atau menunjukkan posisi kesetaraan sempurna, dimana setiap rumah tangga memiliki pendapatan yang sama, atau setidaknya mendekati sama.

Dalam setiap pesta demokrasi, kata berkeadilan memang menggema dalam kampanye, tetapi bagaimana menarik *Lorenz curve* ke arah posisi 45 derajat masih terasa 'sayup-sayup' atau tidak menyebut sulit sekali. Padahal, pilihan-pilihan kebijakan politik ekonomi ini akan menentukan apa yang mestinya dibangun negara dan bagaimana cara membangunnya. Serta,

dimulai dari mana, apa yang menjadi prioritas, bahkan bagaimana menjaganya agar berjalan konsisten dan terarah?

Jadi, membuat pilar ekonomi yang kuat itu merupakan fungsi dari banyak faktor, tidak cukup faktor ekonomi, tetapi juga faktor politik, regulasi, dan yang paling utama adalah faktor kepemimpinan (*leadership*). Dengan kata lain, pemilihan presiden setiap lima tahun merupakan jalan memilih pemimpin bangsa yang memiliki visi ke arah yang sama dengan keinginan rakyat, bukan visi yang hanya memenuhi keinginan pasar atau apalagi hanya keinginan pemodal.

Publik harus diedukasi bagaimana mereka memiliki harapan kepada pemimpinnya yang bisa membuat kemakmuran itu menjadi tinggi derajatnya, tetapi bisa dibagi lebih merata, semua rakyat bergembira merasakan apa yang sama-sama mereka kerjakan. Cita-cita seorang leader, bukan hanya mempertahankan prestasi 'ketimpangan sedang' (nilai koefisien gini 0,4-0,5) yang merupakan karakter seorang manager, tetapi mampu mewujudkan 'ketimpangan rendah' (nilai koefisien gini <0,4, atau bahkan <0,3).

Inilah yang sebenarnya dibutuhkan rakyat banyak, yang berada di pudak sang *leader*. Pesta demokrasi yang 'berbiaya besar' harus bisa ditutup dengan mempekecil ketimpangan pendapatan

atau "menaikkan derajat kemakmuran (*degree of prosperity*). Rumusnya adalah mereformasi struktur ekonomi dengan kebijakan-kebijakan yang bukan saja baik (*good policy*) tetapi juga bertanggung jawab (*proper policy*).

Komitmen Pemerintah

Pemerintah memiliki komitmen kuat untuk mereformasi struktur ekonomi Indonesia, ini antara lain bertujuan untuk membuat pilar ekonomi Indonesia lebih kuat. Namun, dengan bertubinya ancaman krisis global yang menimpa Indonesia, proses reformasi struktur ekonomi Indonesia mengalami pengereman beberapa kali, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir sulit beranjak melewati 5%, bahkan masuk dalam jebakan 5 persen (*5% trap*).

Kue ekonomi (PDB) yang kian membesar masih sulit dibagi rata untuk kesejahteraan rakyat, yang terlihat dari indikator koefisien gini yang menembuh kian lebar. PDB perkapita Indonesia juga sulit beranjak melewati 4.000 US dollar. Indonesia memiliki mimpi untuk meningkatkan PDB per kapita yang masih rendah ini ke posisi di atas 20.000 US dollar (5 kali dari sekarang) pada tahun 2045, tahun yang kita sebut sebagai "Indonesia Emas".

Komitmen kuat pemerintah ditunjukkan dengan pernyataan-pernyataan para menteri keuangan,

di zamannya. Menteri Keuangan Sri Mulyani misalnya, mengatakan "*akan melaksanakan reformasi struktural dengan memperbaiki fondasi perekonomian, baik dari sisi daya saing maupun inovasi. Dengan demikian kita tidak hanya sekadar pulih, tapi juga pulih lebih kuat dan baik*" (ekonomi.okezone.com).

Fokus reformasi adalah pada pemulihan ekonomi dan reformasi struktural terutama untuk mengatasi masalah kualitas sumber daya manusia, serta semua pembangunan infrastruktur dan juga mengubah perekonomian menjadi lebih produktif (detik.com). Namun, hingga saat ini, fondasi ekonomi dari dua pilar ini - daya saing maupun inovasi - masih belum terlalu kuat dibandingkan dengan negara-negara lain. *World Competitiveness Yearbook 2022* melaporkan indeks daya saing Indonesia berada di ranking 44 dunia dari 60 negara yang disurvei.

Sementara itu, dari indikator indeks inovasi global, *World Intellectual Property Organization* (WIPO) melaporkan Indonesia di tahun 2022 berada di peringkat 75 dan 132 negara yang disurvei, walaupun lebih baik dibandingkan dengan tahun 2014 di peringkat 87 dunia. WIPO menilai Indonesia mencatatkan performa baik pada indikator-indikator seperti pendanaan untuk perusahaan *startup* dan *scale-up*, kondisi kluster ekonomi,

kolaborasi riset dan pengembangan universitas dengan industri, dan intensitas aset tidak berwujud perusahaan.

Tetapi, dalam konteks daya saing, level baik itu harus lebih baik lagi. Tantangan ke depan adalah bagaimana memperkuat pilar ekonomi ini. Memasuki pemerintahan baru pada 2024 mendatang, penguatan pilar ekonomi Indonesia akan menjadi isu penting bagi para calon Presiden RI. Kita ingin menyaksikan locatan-loncatan berbagai indeks pembangunan dari baik (*good*) menjadi hebat (*great*), meminjam istilah Jim Collins (2001).

Belajar Dari Australia: Perkuat Riset dan Inovasi

Tidak salah bila kita perlu belajar kehebatan negara tetangga kita, Australia, negara yang wilayahnya bersebelahan dengan Papua, 3.457 km dari Indonesia (indonesia.distanceworld.com). Dalam kampanye pemilu tahun 2013, Tony Abbott, politikus Australia yang menjabat sebagai Perdana Menteri Australia ke-28 dari 2013 hingga 2015, berjanji pemerintahannya akan membangun lima pilar ekonomi (*five pillar economy*) kelas dunia, yang meliputi *manufacturing, agriculture, services, education and mining*.

Situs *theaustralian* menulis bahwa Tony Abbott memfokuskan upaya

penelitian senilai 10 miliar dollar Australia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong pasar baru di Asia. Ia mengeluarkan agenda daya saing senilai 400 juta dollar Australia yang akan mendorong penelitian di lima industri yang sedang berkembang, meningkatkan skema pembagian karyawan, dan memfokuskan kembali sekolah pada pengajaran matematika, sains, dan teknologi. Hal ini juga akan meringankan pembatasan visa 457 bagi pekerja luar negeri.

Perdana Menteri Australia ini mempunyai alasan penguatan lima pilar ekonomi tersebut antara lain karena : *Pertama*, tingginya dolar Australia, yang terkait dengan kenaikan harga komoditas, telah membuat manufaktur tradisional berbiaya rendah menjadi tidak kompetitif. Hal ini kemudian dikenal sebagai "penyakit Belanda", menyusul dampak serupa yang ditimbulkan oleh penemuan gas di Laut Utara pada tahun 1970an.

Kedua, di bawah tekanan untuk membuka tambang baru, perusahaan-perusahaan sumber daya menyerbu pabrik-pabrik untuk mendapatkan pekerja terampil alih-alih melatih mereka sendiri, sehingga menawarkan tingkat upah yang tidak mampu dibayar oleh pengusaha manufaktur. Hal ini mungkin tidak terlalu merugikan jika perusahaan menggunakan peralatan dan infrastrukturnya dari dalam negeri, namun sebagian

besar berasal dari luar negeri. *Ketiga*, peningkatan nilai perdagangan akibat tingginya harga komoditas menutupi perlambatan kinerja produktivitas Australia sejak akhir tahun 1990an. Rasa berpuas diri yang disebabkan oleh *booming* pertambangan mengalihkan perhatian para pembuat kebijakan dari sumber pertumbuhan lain, seperti manufaktur, yang pada akhirnya diperlukan untuk "menyeimbangkan kembali" perekonomian.

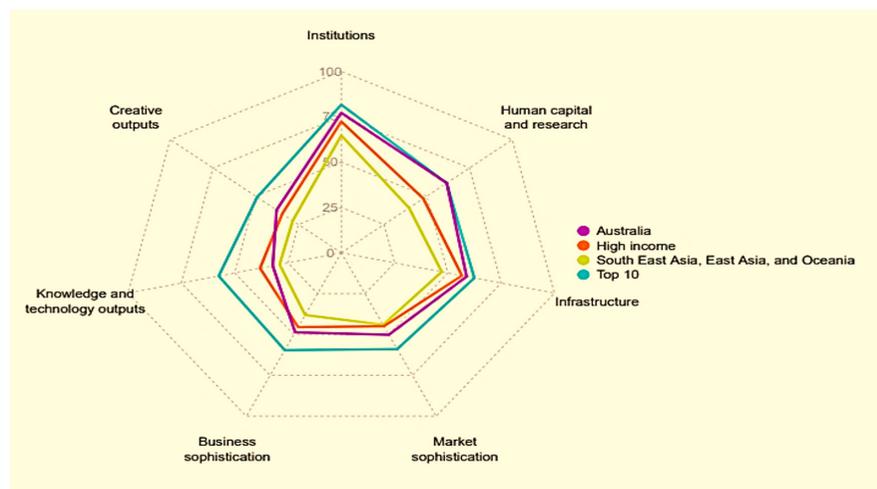
Hingga saat ini, manufaktur masih merupakan pilar penting perekonomian Australia, dan meskipun terjadi kemunduran baru-baru ini, terdapat peluang yang tidak terbatas untuk pertumbuhan dan diversifikasi, khususnya dalam rantai nilai global. Namun pangsa manufaktur terhadap produk domestik bruto Australia telah turun dari 12,9% pada tahun 1979 menjadi 6,2% pada tahun 2022. Hal ini karena perekonomian tumbuh tiga kali lipat selama periode

ini – dua kali lebih cepat dibandingkan manufaktur.

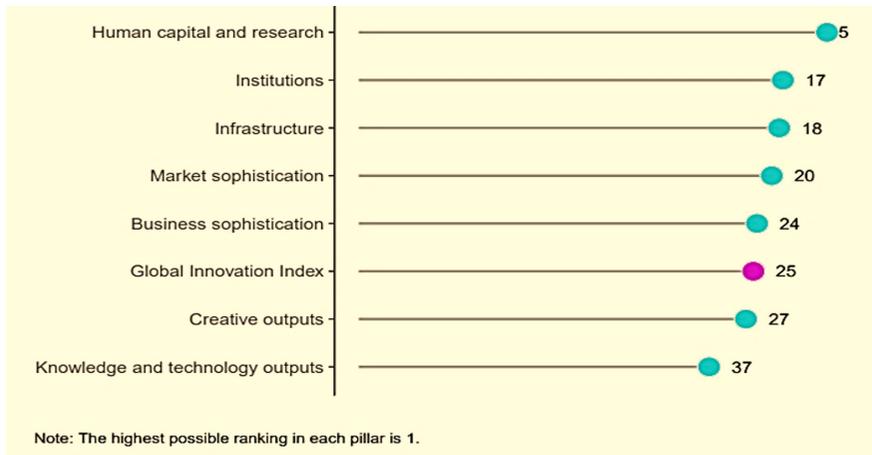
Nilai ekspor manufaktur juga meningkat namun proporsinya menurun terhadap total ekspor dari 49,6% pada tahun 2006 menjadi 35% saat ini, karena meningkatnya pangsa ekspor komoditas. Sepuluh tahun kemudian, apa yang bisa kita saksikan dengan ekonomi Australia? Peringkat daya saing global turun dari peringkat 20 menjadi peringkat 16 (tradingeconomics, 2023). Sedangkan *Global Innovation Index* (GII) Australia di ranking 25 pada 2022. Benchmark 7 pilar GII Australia dapat dilihat pada Gambar 1.

Ada 6 pilar yang ranking Australia berada di atas *the high-income group* yaitu : *Institutions; Human capital and research; Infrastructure; Market sophistication; dan, Creative outputs*. Australia juga memiliki peringkat GII yang baik dalam bidang human capital and research (ranking 5 dunia), institution

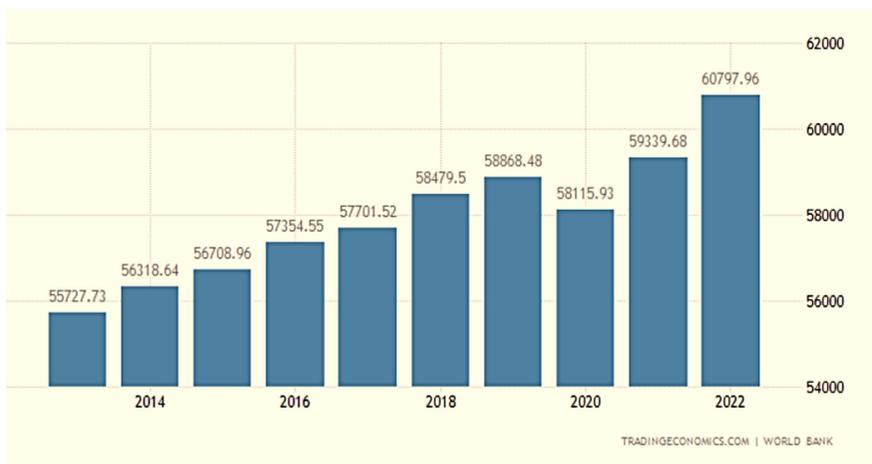
Gambar 1. The seven GII pillar scores for Australia



Gambar 2. The seven GII pillar rank for Australia



Gambar 3. Australia GDP per kapita



(ranking 17 dunia) dan infrastruktur (rangking 18 dunia) (Gambar 2). Sementara GDP per kapitanya pada tahun 2022 sebesar 60,797 US dollar dengan trend yang terus meningkat dalam 10 tahun terakhir. (Gambar 3).

Perkembangan UMKM di Australia juga luar biasa, sebagian besar sudah memasuki pasar global. UKM yang terglobalisasi ini dicirikan oleh inovasi tanpa henti, yang mencakup lebih dari sekadar pengembangan dan

adaptasi teknologi. Mereka juga melakukan inovasi non-teknologi seperti transformasi model bisnis, inovasi berbasis desain, dan metode manufaktur baru, yang pada gilirannya dimungkinkan oleh digitalisasi, pembelajaran mesin (*machine learning*), dan intersection fisik dan virtual dunia dalam "*internet of things*".

Penutup: Perlu Strong Leadership dan Visioner

Untuk mengejar ketertinggalan, Indonesia harus membuat banyak terobosan. Pertanyaannya adalah harus dimulai dari mana dan apa strateginya, inilah yang ditunggu dari para calon Presiden RI periode 2024-2029. Pertandingan itu harus mengalahkan lawan, bukan mengalahkan rekor sendiri. Jangan terbiasa puas dengan prestasi "mengalahkan rekor sendiri", ini budaya yang menghambat inovasi kurang cepat berkembang, dan kurang adanya ambisi untuk melompat lebih jauh. Budayakan "**mengalahkan lawan tanding**". Jadi, tetapkan dulu siapa lawan tanding terdekat kita?

PDB per kapita Australia angkanya 15 kali lipat lebih besar dari PDB per kapita Indonesia. Artinya, Indonesia harus berlari minimal sama dengan 15 kali kecepatannya Australia saat ini untuk mencapai tingkat kemakmuran yang tinggi. Yyang harus dilakukan adalah tetapkan pilar ekonomi yang memiliki daya dorong kuat. Tidak mengapa bila Indonesia mengadopsi cara Australia. Hal ini tentu dilakukan dengan menyesuaikan kondisi dan karakter Indonesia, misalnya dengan lima pilarnya, yaitu *manufacturing, agriculture, services, education and mining*.

Dari sumber daya alam,

ekonomi Indonesia bisa berdiri di atas tiga sektor, yaitu *manufacturing*, *agriculture* dan *mining*. Strategi Hilirisasi dan Industrialisasi yang Indonesia lakukan sudah tepat, yang perlu diperkuat adalah skala bisnisnya dan standar kualitasnya. Tentu ini butuh riset dan inovasi yang kuat, dengan meningkatkan investasi R&D yang saat ini masih rendah (0,1% terhadap PDB). Sepanjang politik fiskal di bidang riset dan inovasi lemah, maka strategi hilirisasi tidak akan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi (*economic value added*) yang besar bagi Indonesia, daya saing sulit beranjak, apalagi meloncat.

Dari sisi inovasi, Australia sudah terdepan, mereka unggul dalam aspek-aspek *Institutions; human capital and research; Infrastructure; market sophistication; business sophistication*; dan, *creative outputs*. Pemerintahan baru mungkin bisa memulai dengan membenahi masalah kelembagaan, masalahnya bukan saja terlalu gemuk dan tumpang tindih, tetapi juga kurang fokus pada prioritas dan terkesan hanya memberi peluang untuk pekerja politik.

Fungsi-fungsi pemerintahan yang berkaitan langsung dengan *knowledge base economy* seperti *human*

capital, perencanaan pembangunan, industri, pertanian, serta riset dan inovasi, harus dipimpin oleh para profesional (non-politik) yang ahli di bidangnya tetapi memiliki kemampuan manajerial yang unggul. Untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, pemerintah perlu memperkuat kapasitas ekonomi kelas menengah. Insentif fiskal harus banyak diarahkan ke pelaku usaha kelas menengah, polulasinya harus banyak dan harus didorong untuk memainkan peran kunci dalam perekonomian nasional.

Karena itu kelembagaan Kementerian dan Lembaga yang terkait dengan UMKM, Koperasi, dan Usaha Kreatif harus berada dalam satu payung kendali dan diperkuat kewenangannya. Yang tidak kalah penting adalah regulasi, perlu ditata kembali untuk memberi jalan penguatan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan. Kewenangan daerah yang terlampau besar tetapi kurang efektif disebabkan karena kelembagaan di tingkat pusat masih lemah.

Regulasi dibuat untuk mempermudah kerja, bukan menghambat kerja. Karena itu salah satu tantangan presiden baru adalah membenahi tumpang tindih regulasi dan paradigma regulasi sebagai “pagar besi” yang membuat para

pemangku kepentingan takut melangkah, bukan sebagai pengawal produktivitas. Semua itu adalah pilar-pilar ekonomi yang perlu didefinisikan dan dirancang ulang oleh pemerintah baru.



Film dan Pariwisata, Potensi Ekonomi melalui Kolaborasi dan Sinergi

Tuti Sariningsih Budi Utami⁷, Afif Hanifah⁸

Indonesia, yang dikenal dengan julukan nusantara, memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Secara geografis, wilayah Indonesia terbagi atas wilayah daratan dan lautan yang cukup luas terbagi dalam ribuan pulau dan kepulauan. Menjadi salah satu negara kepulauan yang terbesar di dunia, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan kekayaan alam yang sangat beragam yang

tersebar di seluruh wilayah baik di daratan, pegunungan, dan lautan.

Indonesia yang berada di sekitar khatulistiwa menciptakan panorama yang luar biasa. Hamparan hutan hujan tropis, dataran tinggi dan pegunungan yang terbentang, dan hamparan pantai serta ekosistem bawah laut menciptakan pesona tersendiri. Wilayah yang terbagi dalam pulau dan

kepulauan menjadikan setiap daerah di Indonesia memiliki panorama dan kekayaan alam yang berbeda-beda.

Tak hanya itu, Indonesia juga memiliki keragaman budaya yang berbeda-beda di setiap daerah. Hal tersebut tentu saja menjadikan setiap wilayah sangat potensial dalam mengembangkan sektor pariwisata daerahnya. Wisata daerah yang berkembang

^{7,8}Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kebijakan Fiskal

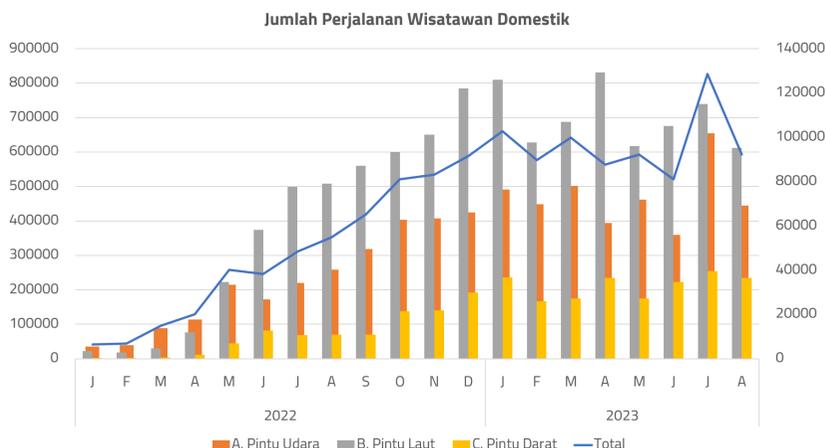
akan menggerakkan roda perekonomian masyarakat yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi cukup signifikan dalam Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Pada tahun 2022, kontribusi sektor pariwisata mencapai 3,6% dari keseluruhan sektor (Pink, 2023). Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB ini mengalami peningkatan apabila dibandingkan tingkat kontribusinya pada tahun 2021 yang sebesar 2,4%. Hal ini menandakan bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan.

Sebelum pandemi Covid-19, kontribusi pariwisata terhadap PDB mencapai 5,9%. Hal ini membuktikan bahwa sektor pariwisata masih dapat dikembangkan lebih lanjut. Data BPS menunjukkan bahwa industri makanan dan minuman menjadi penyumbang terbesar dalam input sektor pariwisata Indonesia. Selain itu, industri pariwisata juga menyerap lebih dari 13 juta tenaga kerja di Indonesia.

Memasuki masa *new normal* dan aktivitas masyarakat kembali pulih, jumlah kunjungan pariwisata dari turis domestik terus mengalami peningkatan. Jumlah perjalanan wisata melalui jalur udara masih menjadi pilihan utama dibandingkan dengan

Grafik 1. Jumlah Perjalanan Wisata Domestik 2022-2023



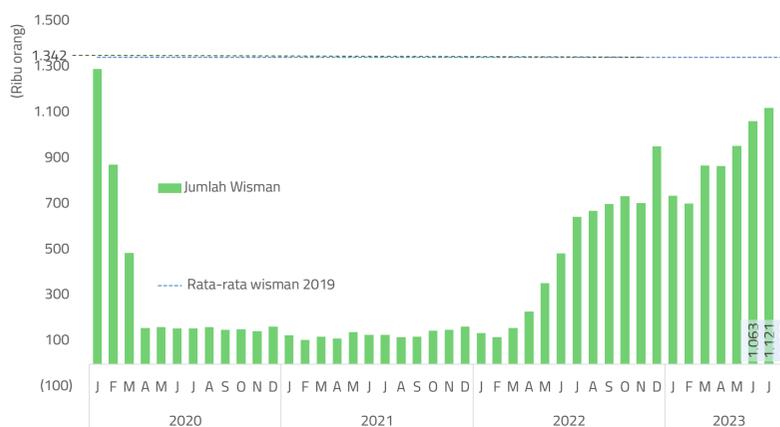
Sumber: BPS, diolah

perjalanan darat dan laut. Hal tersebut terlihat dari kenaikan signifikan pada jumlah perjalanan wisatawan domestik tersebut sepanjang tahun 2022 dan relatif stabil di pertengahan tahun 2023 meskipun sempat terjadi lonjakan yang cukup tinggi pada bulan Juli 2023. Kondisi ini sejalan dengan berlangsungnya masa liburan sekolah pada bulan Juli 2023.

Meskipun belum sepenuhnya kembali ke kondisi pra pandemi, jumlah wisatawan

manca negara terus mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini terjadi sejak akhir semester I 2022 s.d. Agustus 2023. Tren peningkatan ini terus terjadi seiring dengan masa *peak season* liburan hari raya keagamaan dan masa liburan sekolah. Pada bulan Agustus 2023, tercatat 1,13 juta wisatawan mancanegara melakukan kunjungan wisata ke Indonesia, meningkat dari bulan sebelumnya yang sebesar 1,12 juta wisman.

Grafik 2. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2020-



Sumber: BPS, diolah

Hal ini menjadi hal yang positif dan perlu terus dikembangkan. Tidak bisa dipungkiri bahwa kunjungan wisatawan asing yang datang ke Indonesia bertujuan untuk menikmati pesona keindahan alam Indonesia. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa para turis asing tersebut tertarik untuk mengunjungi Indonesia setelah nama Indonesia dan pulau Bali menjadi bagian dari film dan novel berjudul *Eat, Pray, Love* yang cukup fenomenal dan semakin meningkatkan popularitas Indonesia.

Di sisi lain, apabila dilihat lebih dalam terutama dari sisi asal negara para wisatawan mancanegara tersebut, dapat ditelaah lebih lanjut bahwa tren masing-masing negara bervariasi. Hal ini salah satunya terkait dengan masa pembukaan *border/batas* negara yang berbeda-beda. Selain itu, pemulihan ekonomi masing-masing negara dari pandemi juga memiliki masa waktu yang tidak sama.

Dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisata, baik dari wisatawan domestik maupun mancanegara, promosi dapat dilakukan oleh Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Promosi pariwisata, saat ini dapat ditempuh dengan bermacam-macam strategi. Di era digital seperti sekarang ini, peran teknologi informasi, media digital, maupun media sosial cukup memberikan pengaruh yang besar dalam promosi pariwisata daerah.

Pada era ini, media sosial menjadi salah satu senjata ampuh dalam menarik wisatawan untuk berkunjung di suatu objek pariwisata atau daerah yang memiliki potensi wisata yang patut dikunjungi. Ulasan-ulasan yang diunggah di Facebook, Instagram, X (Twitter)-, Tik Tok, dll, baik dalam bentuk foto maupun video pendek (*reels*) dari pengunjung objek/daerah wisata menjadi rujukan utama para calon wisatawan dalam menentukan destinasi wisata yang akan dikunjungi.

Strategi lain yang cukup efektif dalam mempromosikan wisata daerah adalah melalui film. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyebutkan bahwa film tidak hanya berguna sebagai sarana hiburan, tetapi juga untuk mempromosikan pariwisata. Film menyajikan gambaran visual yang lebih

menyeluruh dibandingkan dengan foto ataupun video pendek (*reels*) yang diunggah di media sosial. Di dalam studi Yudaningsar, dkk (2019), berdasarkan penelitian sebelumnya (Asroro, 2019) menyatakan bahwa saat film dipublikasikan sering kali destinasi-destinasi wisata yang terekspos atau terekam melalui film menjadi terkenal karena faktor ketidaksengajaan. Tak jarang alur film juga dibuat untuk menggambarkan sejarah, legenda, atau adat istiadat daerah yang menjadi latar belakang film tersebut.

Tak sedikit film yang sudah diproduksi dengan latar di beberapa wilayah di Indonesia cukup mendongkrak sektor pariwisata daerah. Tak hanya wisata alam, tetapi juga wisata budaya, religi, sejarah, pendidikan, dan kuliner. Salah satu film yang cukup

Tabel 1. Dampak Film terhadap Pariwisata Indonesia

Judul Film	Lokasi	Dampak
Petualangan Sherina (2000)	Observatorium Boscha	Peningkatan jumlah kunjungan ke observatorium
Pasir Berbisik	Gunung Bromo	Lokasi wisata menjadi dikenal masyarakat dan menjadi destinasi wisata dan lokasi foto prewedding
Laskar Pelangi (2012)	Bangka Belitung	Sektor pariwisata Belitung melonjak 1800%
5 cm (2013)	Gunung Semeru	Jumlah pendaki melonjak 100%
AADC 2 (2016)	Via Via Resto and Bakery	Mengalami kenaikan jumlah pengunjung 40%
	Candi Ratu Boko	Jumlah pengunjung meningkat dari 200-300 orang menjadi 500 orang
	Rumah Doa Bukit Rhema (Gereja Ayam)	Jumlah wisawana meningkat dari 80-100 orang per hari menjadi 500-600 orang
Susah Sinyal (2017)	Air terjun tanggudu, Waingapu	Pulau Sumba menjadi populer dan banyak lokasi wisata yang ramai pengunjung
Bali: Beats of Paradise (2019)	Bali	Memperkuat posisi Bali dalam top of mind calon wisatawan mancanegara

Sumber: Abdurrahman (2019), dikutip kembali oleh Yudaningsar, dkk (2019)

berhasil dalam mendongkrak sektor pariwisata Indonesia adalah Laskar Pelangi yang mengambil latar panorama alam daerah dan adat istiadat istiadat penduduk Bangka Belitung.

Film lainnya yang juga cukup sukses meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan adalah film Ada Apa Dengan Cinta 2 (AADC2), yang mengambil beberapa tempat di Yogyakarta, seperti Candi Ratu Boko, Gereja Alam, dll. Tak hanya itu, Eat, Pray, Love, salah satu film yang dibintangi oleh Julia Roberts, juga dinilai cukup berhasil mempromosikan kembali ke dunia internasional bahwa Bali masih menjadi tempat wisata yang wajib dikunjungi.

Tidak bisa dipungkiri bahwa industri perfilman Indonesia yang terus bangkit akan mendorong penyerapan tenaga kerja. Dengan semakin banyaknya produksi film lokal yang berkualitas akan mendorong minat fakultas seni dan budaya untuk membuka jurusan perfilman dan segala hal yang terkait dengan industri perfilman. Di sisi lain, semakin banyaknya industri perfilman yang menggunakan berbagai tempat wisata di Indonesia sebagai lokasi pengambilan film semakin memberi peluang promosi tempat pariwisata domestik ke mancanegara.

Dukungan pemerintah untuk perkembangan industri kreatif termasuk industri film di dalamnya sangat diperlukan. Berdasarkan UU

No. 24/2019 tentang Ekonomi Kreatif, dukungan pemerintah dalam perkembangan ekosistem ekonomi kreatif dapat dilakukan diantaranya melalui fasilitas pendanaan dan pembiayaan, serta pemberian insentif baik fiskal maupun nonfiskal. Insentif bagi ekosistem ekonomi kreatif khususnya industri film nasional saat ini sudah diberikan pemerintah antara lain dalam bentuk fasilitas *tax allowance*, Kawasan Ekonomi Khusus, pembebasan bea masuk impor sementara, serta pembebasan dan/atau pengurangan tarif pajak. Bahkan, di saat pandemi Covid-19 terjadi, industri perfilman juga cukup terkena terdampak. Pada masa tersebut, pemerintah memberikan PEN untuk subsektor film mendorong industri dapat bangkit dan bergeliat kembali.

Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan dukungan secara tidak langsung bagi industri film nasional melalui Dana Abadi Kebudayaan (DAKB). DAKB merupakan bagian dari Dana Abadi di Bidang Pendidikan sebagaimana diatur di dalam Perpres No. 111/2021. Penggunaan hasil pengembangan DAKB meliputi fasilitasi bidang kebudayaan bagi komunitas dan pelaku budaya, produksi kegiatan kebudayaan, produksi media, dan program layanan lainnya sesuai arahan Dewan Penyantun.

Dalam kaitannya dengan ekosistem industri film, DAKB

cukup memberikan kontribusi dalam pengembangan kebudayaan melalui film. Pada tahun 2022, LPDP bekerjasama dengan Kemendikbud telah melakukan beberapa kategori kegiatan untuk pemanfaatan DAKB. Kategori kegiatan mendukung industri film dilakukan melalui eksebisi, yaitu kategori Sinema Mikro, dan kategori *Event Strategis* yang beberapa penerima manfaatnya juga bergerak dalam tahap eksebisi perfilman melalui festival-festival film.

Pada akhirnya, pengembangan pariwisata domestik tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah. Pariwisata domestik perlu campur tangan dan sinergi serta kolaborasi yang apik dari berbagai kalangan untuk dapat lebih berkembang dan menjadi salah satu sektor industri yang dapat diandalkan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kementerian/Lembaga, para pelaku industri pariwisata, perfilman, dan industri kreatif perlu meningkatkan kerja sama dalam mencapai tujuan tersebut.



Anak Terlindungi - Indonesia Maju

Rina Karlina⁹, Galuh Chandra Wibowo¹⁰, Achmad Budi Setyawan¹¹

Indonesia saat ini memiliki profil demografi yang sangat menjanjikan. Populasi anak Indonesia saat ini mencapai sepertiga dari populasi penduduk Indonesia. Sementara itu, populasi usia produktifnya mencapai sekitar 69%. Modal sumber daya manusia tersebut tentunya perlu dibekali dengan kompetensi dan *skill* yang memadai agar memiliki produktivitas dan daya saing yang tinggi untuk dapat berperan sebagai motor pertumbuhan ekonomi dalam mencapai visi Indonesia Maju

2045. Kebijakan fiskal dalam hal ini berperan penting untuk mendukung investasi dalam pembangunan modal manusia (*human capital development*) khususnya untuk anak. Anggaran yang berpihak pada anak berfungsi untuk menjaga dan melindungi hak-hak anak sekaligus untuk membangun generasi yang produktif dan berkualitas. Oleh karena itu, Pemerintah berkomitmen dalam memprioritaskan anggaran untuk peningkatan kualitas SDM khususnya terkait anak.

Upaya peningkatan kesejahteraan anak tidak hanya peran dari Pemerintah saja, tetapi juga merupakan hasil kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak. Kementerian Keuangan dalam hal ini senantiasa menjaga hubungan baik dan bersinergi dengan berbagai mitra pembangunan, seperti misalnya UNICEF yang merupakan salah satu organisasi yang berfokus pada anak. Selama beberapa tahun terakhir, UNICEF telah memberikan dukungan teknis kepada Kementerian

⁹Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Kebijakan Fiskal

¹⁰Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

¹¹Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Badan Kebijakan Fiskal

Keuangan antara lain melalui pembangunan model simulasi maupun penyelenggaraan kajian yang berfokus kepada anak.

Sejak akhir 2018, UNICEF Indonesia telah berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan dalam mengembangkan model INDOMOD dengan menggunakan data SUSENAS dari BPS. INDOMOD atau *Indonesia Microsimulation Model* merupakan pengembangan dari *software* EUROMOD yang merupakan sebuah *tax-benefit microsimulation model*. INDOMOD merupakan sebuah aplikasi statis yang memungkinkan simulasi atas sejumlah kebijakan seperti perubahan perpajakan dan perlindungan sosial (perlinsos) terhadap variabel sosioekonomi seperti tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Saat ini, model termutakhir adalah INDOMOD versi

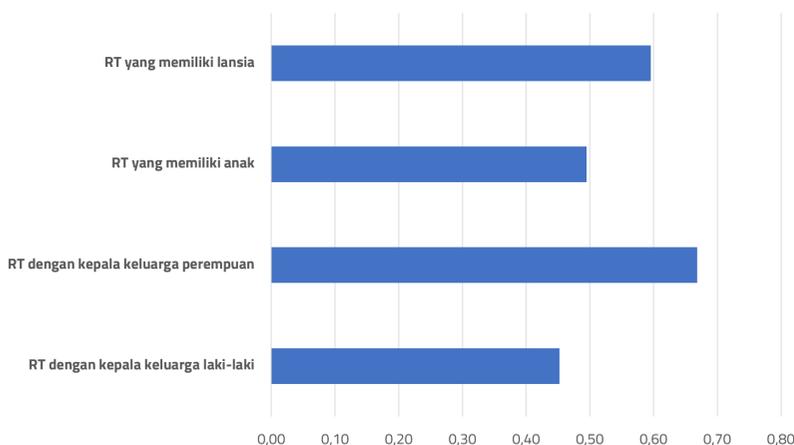
3.1 yang menggunakan data Susenas 2020 dan kemudian diperbarui ke tahun 2021 dengan penyesuaian menggunakan variabel makro ekonomi dan data tambahan lainnya dalam kondisi pandemi Covid-19.

Simulasi melalui INDOMOD menunjukkan bahwa berbagai program perlinsos yang diberikan selama pandemi di tahun 2021 berdampak positif dalam menahan naiknya tingkat kemiskinan lebih tinggi (Gambar 1). Adapun program perlinsos yang disimulasikan hanya terdiri dari Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DD), Bantuan Beras PPKM, Program Sembako PPKM, Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan Kartu Prakerja. Hal ini disebabkan tidak seluruh program perlinsos yang diberikan oleh Pemerintah dapat disimulasikan dalam model tersebut karena keterbatasan data.

Pada Gambar 1 terlihat bahwa berbagai program perlinsos memberikan dukungan lebih besar terhadap penurunan kemiskinan pada kelompok rentan yang antara lain meliputi Rumah Tangga (RT) dengan kepala keluarga perempuan (0,67 pp), RT yang memiliki lansia (0,6 pp), dan RT yang memiliki anak (0,5 pp), dibandingkan dengan RT dengan kepala keluarga laki-laki (0,45 pp). Hal ini menunjukkan dukungan dan keberpihakan Pemerintah terhadap kelompok masyarakat rentan khususnya di saat krisis terjadi. Pemerintah menyadari bahwa kesejahteraan kelompok rentan perlu mendapat perhatian lebih untuk menghindari munculnya dampak negatif yang lebih besar. Untuk itu, salah satu strategi yang dijalankan Pemerintah adalah memberikan perluasan program perlinsos selama pandemi yang antara lain bertujuan untuk meningkatkan komplementaritas dan mencakup rumah tangga yang belum menerima bantuan sosial sama sekali.

Pada saat pandemi Covid-19 merebak, dukungan Pemerintah terhadap kesejahteraan anak masih terus berjalan bahkan mengalami penambahan. Pada aspek pendidikan, selain program reguler Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP),

Gambar 1. Dampak Program Perlindungan Sosial Selama Covid-19 Terhadap Penurunan Kemiskinan Menurut Kategori Rumah Tangga (dalam poin persentase)



Sumber: hasil simulasi INDOMOD versi 3.1

Pemerintah pun memberikan bantuan tambahan berupa subsidi kuota internet untuk menunjang proses pembelajaran virtual dan/ atau jarak jauh pada tahun 2020. Selain itu, Pemerintah pun menaikkan indeks bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) per komponen yang beberapa diantaranya berkaitan dengan pemenuhan hak anak pada usia dini dan juga pendidikan. Kemudian, pada tahun 2021, Pemerintah juga memberikan tambahan bantuan berupa Bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) selama 1 semester.

Dukungan terhadap pengembangan kualitas sumber daya manusia terus berlanjut pada tahun 2024 selaras dengan arah transformasi ekonomi. Anggaran Pendidikan dalam RAPBN tahun 2024 meningkat sebesar 19,7% menjadi Rp660,8 T yang antara lain digunakan untuk dukungan pendidikan pada PKH, PIP, KIP Kuliah, dan dana BOS. Anggaran Kesehatan pun tumbuh sebesar 8,1% menjadi Rp186,4 T yang diantaranya untuk bantuan iuran peserta PBI JKN, serta percepatan penurunan *stunting*. Sementara itu, anggaran perlindungan sosial meningkat menjadi Rp493,5 T, tumbuh sebesar 12,4% dari tahun 2023 yang mencakup antara lain untuk PKH dan Kartu Sembako, serta subsidi.

Komitmen Kemenkeu terhadap Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak juga mendapatkan apresiasi

dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kemenkeu dinyatakan sebagai salah satu dari 3 (tiga) K/L Terbaik Nasional (bersama Kemensos dan KemenPPPA) dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dalam acara Penghargaan Anugerah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 2023. Selaku pengelola keuangan negara, Kemenkeu telah memprioritaskan berbagai kebijakan fiskal yang berfokus pada anak. Hal ini tercermin dalam pengalokasian anggaran antara lain penanganan *stunting*, BOS dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), dan rehabilitasi gedung sekolah dasar dan menengah. Dalam lingkup internal, Kemenkeu juga mengimplementasikan kebijakan sebagai *support system* bagi para pegawai dalam membangun keluarga sejahtera yang mendukung kualitas perkembangan anak, seperti cuti bagi suami saat istri melahirkan serta penyediaan sarana dan prasarana ramah anak antara lain *daycare*, ruang laktasi, dan fasilitas kesehatan bagi Ibu dan Anak pada Balai Kesehatan.

Pemerintah terus berkomitmen untuk memastikan kesejahteraan anak sebagai aset utama menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu fokus kebijakan fiskal dalam jangka pendek difokuskan pada penurunan prevalensi *stunting* yang pada tahun 2024 ditargetkan turun

menjadi 14 persen dari 21,6 persen di tahun 2022. Target tersebut serta beberapa fokus kebijakan lainnya terkait anak telah dituangkan pula dalam dokumen rencana pembangunan. Selain itu, Pemerintah pun berupaya untuk terus menjaga alokasi anggaran yang memadai di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang merupakan tiga pilar penting dalam pembangunan modal manusia. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Keuangan – Ibu Sri Mulyani Indrawati pada kegiatan *Wonder Trip* "Main ke Kantor Menteri" pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa "anak-anak adalah para pembawa obor bangsa ini, merekalah masa depan Indonesia."



Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian (*Track Access Charge/TAC*): Telaah PMK No. 138 Tahun 2021

Agunan Paulus Samosir¹²

Sejak beberapa tahun terakhir ini isu perawatan dan pengoperasian barang milik negara (BMN) atau *infrastructure maintenance operation* (IMO) dan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian atau *track access charge* (TAC) terus menerus dibahas oleh kementerian dan lembaga serta Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK). Dalam praktiknya, sering terjadi perbedaan pemahaman berapa sebenarnya biaya yang harus dibayar oleh pemerintah kepada PT KAI saat melaksanakan IMO.

Di lain pihak, PT KAI juga harus membayar TAC kepada pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian

Perhubungan (Kemenhub). TAC dianggap terlalu tinggi oleh PT KAI. Secara teknis, TAC belum diterapkan melalui perhitungan *real cost* atas penggunaan BMN. Berdasarkan PP No. 15/2016 tentang PNPB yang berlaku di Kemenhub bahwa persentase TAC yang harus dibayar PT KAI kepada negara sebesar 75% dari nilai IMO membebani perusahaan. Ditambah lagi

¹²Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Badan Kebijakan Fiskal

dengan situasi nilai IMO yang diperoleh PT KAI selalu lebih kecil dari kebutuhan sebenarnya. Perhitungan seperti ini menempatkan PT KAI pada posisi dilematis karena pakai tidak pakai BMN, PT KAI harus membayar TAC.

Awal Oktober 2021, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan PMK No. 138/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang bersifat volatil dan kebutuhan mendesak yang berlaku pada Kemenhub. Dalam PMK tersebut disebutkan bahwa tarif PNBP atas TAC perkeretaapian dihitung dengan formula sebagai berikut:

$TAC_{KA} = GT_{KA} \times KM_{KA} \times satuan\ biaya\ penggunaan\ prasarana\ KA \times faktor\ prioritas\ penggunaan\ prasarana.$

TAC_{KA} merupakan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian yang dibebankan terhadap satu kali perjalanan KA (Rp). GT_{KA} merupakan berat rangkaian KA berdasarkan stamformasi ditambah berat muatan (GT). KM_{KA} merupakan panjang lintasan KA yang dilewati (KM). Satuan biaya penggunaan prasarana KA (SBPP) menurut PMK No. 138/2021 adalah satuan biaya penggunaan prasarana KA yang diformulasikan berdasarkan atas sejumlah faktor, antara lain nilai aset BMN prasarana KA, depresiasi, rata-rata standar biaya perawatan dan

pengoperasian prasarana KA (Rp/GT.Km). Dalam PMK No. 138/2021, SBPP ditetapkan sebesar Rp57,7 per GT.Km.

Penetapan SBP3 sebesar Rp57,7 per GT.Km ini cukup mengejutkan dan tidak selaras dengan formula yang ditetapkan PP No. 15/2016 tentang Jenis dan Tarif PNBP Kemenhub. Besaran SBP3 tersebut mengakibatkan TAC yang dibayar oleh PT KAI menjadi jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Barang Milik Negara

Pasal 154 ayat (1) dalam UU No. 23/2007 tentang Perkeretaapian menyebutkan TAC adalah biaya yang harus dibayar oleh penyelenggara sarana perkeretaapian untuk penggunaan prasarana perkeretaapian yang dioperasikan oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian. Besarnya TAC dihitung berdasarkan *pedoman penetapan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian yang ditetapkan oleh pemerintah.*

Selanjutnya, pemerintah menerbitkan PP No. 72/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian untuk menguatkan UU 23/2007 terkait TAC. Pasal 159 dalam PP tersebut menyebutkan penyelenggara sarana perkeretaapian harus membayar TAC. Besarnya TAC yang dibayar

oleh penyelenggara sarana perkeretaapian dihitung berdasarkan *pedoman penetapan TAC yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.*

PP No. 72/2009 menyebutkan pedoman penetapan TAC perkeretaapian dihitung berdasarkan (i) beban penggunaan prasarana yang berdampak pada biaya perawatan, (ii) biaya pengoperasian, dan (iii) penyusutan prasarana dengan memperhitungkan prasarana dengan memperhitungkan prioritas penggunaan prasarana perkeretaapian.

Pasal 12 ayat (1) dalam Perpres No. 53/2012 kembali menyebutkan bahwa setiap penyelenggara sarana perkeretaapian wajib membayar TAC perkeretaapian kepada Badan Usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian. Selanjutnya Pasal 12 ayat (2) menyebutkan bahwa besaran biaya penggunaan prasarana perkeretaapian dihitung berdasarkan *pedoman penetapan TAC yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.*

Pedoman perhitungan TAC BMN ini baru diterbitkan Menteri Perhubungan pada tahun 2013 dengan Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No. 62/2013. Pasal 3 dalam PM tersebut menyebutkan bahwa TAC dihitung berdasarkan beban TAC yang meliputi (i) biaya perawatan, (ii) biaya pengoperasian dan (iii) biaya

penyusutan prasarana dengan memperhitungkan prioritas pengoperasian kereta api yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Menteri.

Terbitnya PMK No. 138/2021 menimbulkan polemik bagi PT KAI. Pertimbangan utama PMK 138/2021 adalah (i) bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 ayat (3), Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (4), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 69/2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis PNBPN, dan (ii) bahwa dalam PP No. 15/2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN Pajak yang berlaku pada Kemenhub belum diatur jenis dan tarif PNBPN berupa penyediaan ruang promosi pada sistem elektronik (*digital platform*) di lingkungan Kemenhub.

Selanjutnya PP No. 69/2020 Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam hal tertentu tarif atas jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (4) huruf a, dan ayat (6), dapat diatur dengan Peraturan Menteri. Sedangkan Pasal 8 ayat (2) yaitu hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: (a) tarif bersifat volatil; dan/atau (b) kebutuhan mendesak.

PP 15/2016, Pasal 1 ayat (1) Jenis PNBPN yang berlaku pada Kemenhub meliputi penerimaan dari: (1) jasa transportasi darat, (2) jasa transportasi perkeretaapian, (3) jasa transportasi laut, (4) jasa transportasi udara, (5)

jasa pendidikan dan pelatihan serta jasa penggunaan sarana dan prasarana, dan (6) denda administratif.

Pasal 2 ayat (1) menyebutkan selain yang ditetapkan dalam lampiran, jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, meliputi juga: (a) jenis PNBPN yang berasal dari jasa transportasi perkeretaapian berupa biaya penggunaan prasarana perkeretaapian. TAC tersebut sudah disebutkan dalam PP No. 15/2016 diulangi dalam PMK No. 138/2021 Pasal 1 ayat (1) huruf b bahwa TAC masuk dalam kebutuhan mendesak. Adapun formula TAC dalam PP No. 15/2016 adalah $TAC_{KA} =$. PMK No. 138/2021 merubah formula yang dinyatakan dalam PP No. 15/2016 dengan memasukkan SBPP KA sebesar Rp57,7 per GT.km.

Satuan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian

Penetapan besaran satuan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian dalam PMK No. 138 tahun 2021 sebesar Rp57,7 per GT.Km diperoleh dari rekomendasi hasil kajian Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemenhub. Hasil kajian tersebut merekomendasikan revisi PP No. 15 tahun 2016 yang selama ini berlaku.

Formula yang diusulkan Balitbang, menggunakan

metode *pricing method* yang mewajibkan PT KAI membayar sejumlah tarif dasar dikali dengan pemakaian aktual (*pay as you go*). SBP3 merupakan formulasi yang didasarkan atas (i) nilai aset BMN prasarana KA, (ii) depresiasi, (iii) rata-rata standar biaya perawatan dan (iv) rata standar biaya pengoperasian prasarana perkeretaapian per-Km.

Berdasarkan data SIMAK BMN DJKA, Kemenhub per 30 Juni 2019 menyebutkan bahwa total nilai aset BMN DJKA adalah Rp246,06 triliun. Sedangkan panjang jalur KA beroperasi sampai dengan Semester I tahun 2019 adalah 5.634,36 Km. BMN yang terkait dengan prasarana perkeretaapian adalah tanah, gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, jaringan dan irigasi. Nilai aset tanah sebesar Rp159,97 miliar atau 66,16% dari total aset BMN Perkeretaapian.

Asumsi rata-rata umur teknis jalur KA adalah 50 tahun. Nilai depresiasi aset BMN perkeretaapian jalur KA baru sekitar 2% per tahun. Nilai depresiasi per hari adalah persentase depresiasi per tahun dikali nilai total aset BMN dibagi panjang Km jalur dibagi 365 hari. Nilai depresiasi per hari sebesar Rp2.351.459,63. Berdasarkan nilai depresiasi per hari diperoleh SBP3 sebesar Rp57,7 GT.Km. Nilai depresiasi inilah yang digunakan dalam SBP3 pada PMK No. 138/2021.

Perhitungan Depresiasi dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 47 tentang akuntansi tanah menyebutkan bahwa kepemilikan tanah berdasar hak apapun disebut tanah, disertai pengungkapan mengenai jenis hak dan masa manfaat. *Kepemilikan tanah berdasar berbagai jenis hak tidak dapat disusutkan* kecuali dapat diprediksi bahwa tak mungkin atau kecil kemungkinan bahwa perpanjangan atau pembaharuan hak dapat diperoleh manajemen.

Tanah tidak disusutkan karena memiliki masa manfaat yang tidak terbatas. Tanah dapat disusutkan jika terdapat kondisi sebagai berikut: (i) kondisi kualitas tanah tak layak lagi untuk digunakan dalam operasi utama perusahaan, (ii) sifat operasi utama meninggalkan tanah dan bangunan begitu saja apabila proyek selesai, dan (iii) prediksi manajemen atau kepastian bahwa perpanjangan atau pembaharuan hak kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh. Dengan demikian, tanah yang merupakan salah satu aset BMN perkeretaapian Indonesia tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan depresiasi sesuai PSAK No. 47.

Perhitungan SBPP KA yang dilakukan Balitbang sebesar

Rp57,7 GT.Km memasukkan tanah sebagai salah satu komponen depresiasi. Bila perhitungan SBP3 dilakukan perhitungan dengan tidak memasukkan tanah sebagai komponen depresiasi sesuai PSAK No. 47 diperoleh SBP3 sebesar Rp29,3 GT.Km. Besaran SBPP KA ini jauh lebih rendah atau hanya 51% dari besaran SPB3 yang dihitung oleh Balitbang.

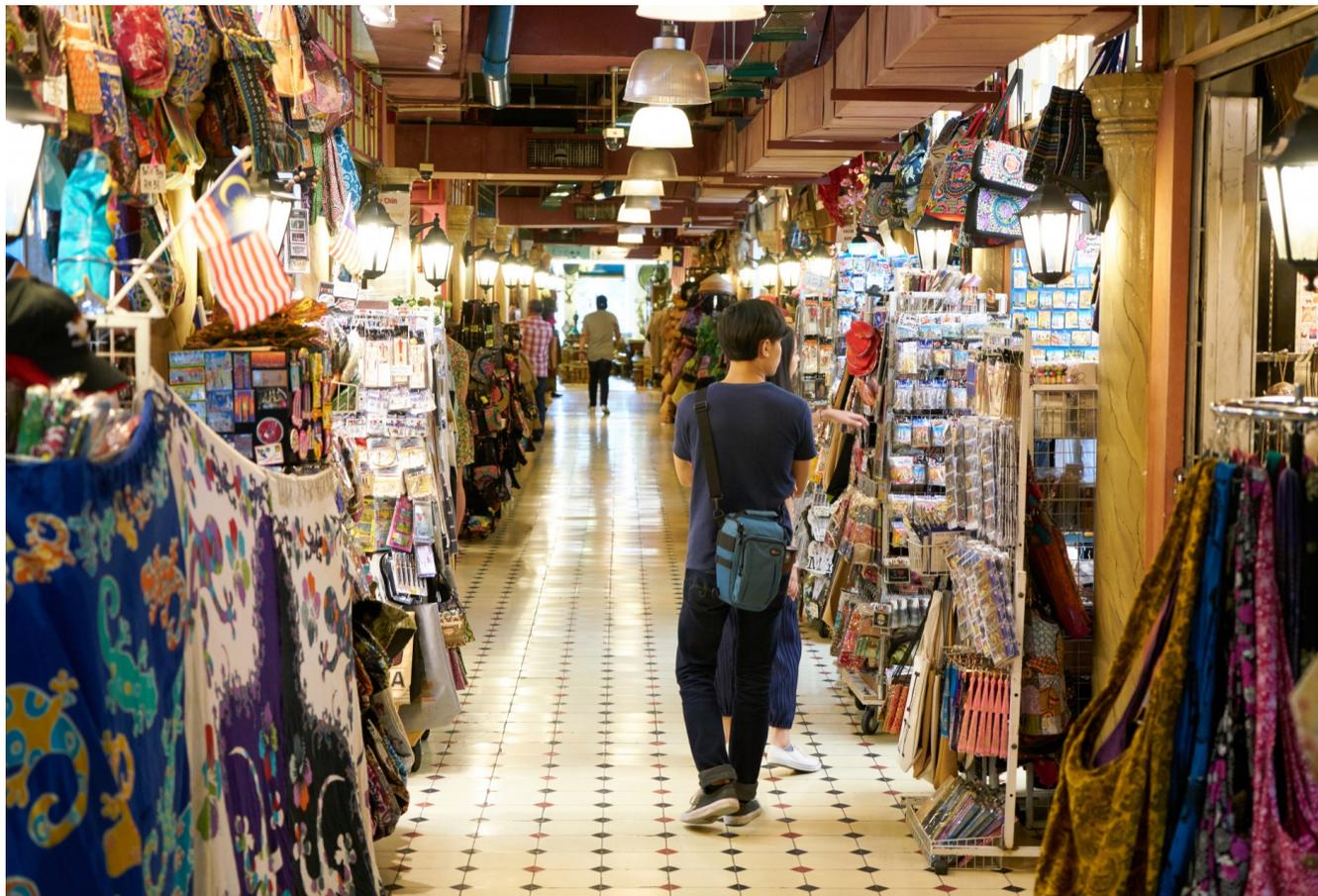
Besaran SBP3 ini makin rendah dengan memperhitungkan depresiasi yang dikenakan ke PT KAI sebesar Rp0,00 menjadi Rp14,78 per GT.Km. Depresiasi sebesar Rp0,00 merupakan amanat dari PP No. 15/2016.

Penutup

Penerapan SBP3 dalam PMK No. 138 tahun 2021 ini tidak sejalan dengan amanat PP No. 15 tahun 2016. Kebutuhan mendesak yang direkomendasikan BPK dalam PP No. 69/2020 adalah pemisahan tata kelola IMO dan TAC yang selama ini disatukan. Salah satu yang direkomendasikan BPK untuk merawat dan mengoperasikan prasarana perkeretaapian BMN adalah pembentukan badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian (BUP3) yang telah diamanatkan dalam Perpres No. 53/2012. Oleh karena itu, pengguna BMN perkeretaapian membayar TAC kepada BUP3.

Referensi SBP3 yang ditetapkan dalam PMK No. 138/2021 berdasarkan hasil kajian Balitbang Kemenhub dengan memasukkan tanah sebagai unsur depresiasi. Hal ini tidak sejalan dengan PSAK No. 47.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk merawat dan mengoperasikan prasarana perkeretaapian BMN sesuai keselamatan publik pengguna kereta api. Berdasarkan analisis di atas, formula TAC yang ditetapkan PMK No. 138 tahun 2021 segera direvisi terutama perhitungan SBP3 sesuai dengan PSAK.



Mampukah *Alternative Credit Scoring* Meningkatkan Akses Pembiayaan UMKM?

Puput Waryanto¹³

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi yang besar pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, yaitu sebesar 60,5% (Kemenkop UKM, 2023). Dalam lingkup yang lebih luas, menurut Yoshino dan Taghizadeh-Hesary (2018), UMKM adalah tulang punggung ekonomi Asia. UMKM menyumbang lebih dari 96% dari semua bisnis Asia, dan menyediakan dua dari tiga pekerjaan sektor

swasta di benua ini. Di Indonesia, peran penting UMKM dalam perekonomian Indonesia tidak terlepas dari kemampuannya untuk menyerap banyak tenaga kerja dan menghasilkan nilai tambah yang besar sehingga menjadikannya sebagai salah satu motor utama penggerak perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus mengembangkan UMKM. Namun demikian, banyak tantangan yang masih

menghadang pertumbuhan UMKM di Indonesia. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan UMKM di antaranya adalah keterampilan, akses ke pasar, teknologi, dan akses layanan keuangan formal, khususnya pembiayaan.

Pembiayaan tidak menjadi kendala apabila pemilik UMKM memang sudah kaya harta dari lahir. Dengan demikian, mereka tidak mengalami kesulitan dalam

¹³Pegawai pada Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

permodalan maupun sumber pinjaman dari pihak lain. Yang menjadi masalah adalah ketika seorang perintis UMKM yang kreatif dan inovatif tetapi tidak memiliki modal yang cukup untuk membangun bisnis UMKM. Sekalipun sudah kaya, apabila kekayaannya tidak mencukupi untuk mengawali binsisnya, maka mereka akan mengalami masalah permodalan juga. Machmud dan Huda (2011), mencatat hanya beberapa UMKM yang hanya mengandalkan sumber lembaga keuangan formal eksternal, yaitu sebesar 3,1%. Kemudian, riset pembiayaan UMKM yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia (BI) tentang Pengolahan Udang Rebon di Kabupaten Cirebon pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM memang masih sangat tergantung dari dana pribadi sebagai modal, yakni 62%. Selebihnya, pelaku UMKM yang lain menggunakan bank keliling sebesar 23%, bank syariah sebesar 9%, dan koperasi sebesar 6%. Fakta ini menunjukkan bahwa peranan pembiayaan formal masih minim karena keterbatasan akses ke pembiayaan formal.

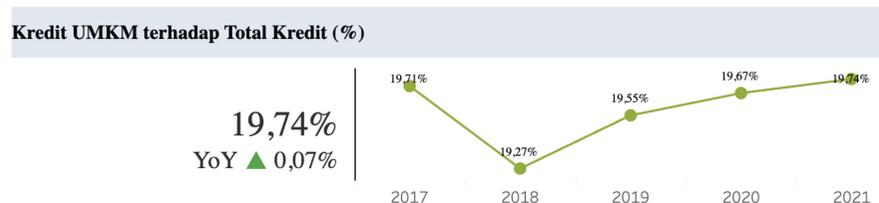
Gambar 1 menunjukkan persentase kredit UMKM terhadap total kredit. Beberapa tahun berlalu, data pembiayaan untuk UMKM tidak menunjukkan banyak perubahan. Publikasi Kementerian UMKM (2023) menyatakan bahwa rasio kredit UMKM terhadap total kredit pada tahun 2021 hanya meningkat 0,07% apabila dibandingkan dengan tahun 2020, dan justru menurun apabila dibandingkan dengan tahun 2017. Padahal, sesuai dengan analisis yang dilakukan oleh Bank BRI (2022), 18 juta pelanggan UMKM masih belum mendapatkan pembiayaan dan sebanyak 45 juta pelanggan masih membutuhkan tambahan pembiayaan. Fakta ini menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan bagi UMKM yang besar masih belum diikuti dengan upaya peningkatan akses pinjaman kepada UMKM secara drastis. Akses UMKM ke keuangan formal masih tetap dianggap menjadi penghalang pertumbuhan bisnis UMKM.

Masalah pembiayaan UMKM telah dikaji melalui berbagai studi. Studi Chowdhury dan Alam (2017) atas 86 UMKM di Bangladesh menyampaikan

bahwa ukuran dan usia perusahaan, pendidikan dan keterampilan pemilik, dan kondisi kredit yang tidak menguntungkan seperti suku bunga tinggi dan kurangnya jaminan adalah beberapa hambatan terbesar yang dihadapi UMKM di Bangladesh dalam mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan. Beberapa alasan sulitnya UMKM mendapatkan akses keuangan juga dibedakan menurut Machmud dan Huda (2011) menjadi 3 hal. Pertama, UMKM tidak dapat mengakses sumber eksternal karena mereka menyadari bahwa biaya transaksi dalam hal biaya administrasi dan penyediaan terlalu tinggi. Kedua, jaminan untuk memenuhi persyaratan lembaga keuangan tidak cukup karena sebagian besar aset yang disediakan untuk jaminan pinjaman belum disertifikasi. Karena mereka membutuhkan dukungan keuangan yang cepat untuk mempertahankan kegiatan reguler mereka, UMKM lebih memilih menggunakan sumber eksternal dengan suku bunga tinggi, terutama dari lembaga keuangan informal. Terakhir, perusahaan-perusahaan kecil dan menengah tidak memiliki administrasi yang baik sehingga mereka tidak dapat menghasilkan rencana bisnis yang baik seperti yang dibutuhkan oleh lembaga formal.

Berbagai tantangan besar dalam mengakses keuangan murah bagi UMKM menurut Yoshino dan Taghizadeh-Hesary (2018), berasal dari

Gambar 1. Persentase Kredit UMKM terhadap Total Kredit



Sumber: Kemenkop UKM (2023)

masalah informasi asimetris antara pemasok dan pemohon dana serta biaya transaksi yang tinggi. Lembaga keuangan menggunakan proses *credit scoring* untuk menilai kelayakan calon nasabah untuk mendapatkan pembiayaan. Menurut Roy dan Saw (2021), lembaga keuangan juga menggunakan model *credit scoring* untuk mengidentifikasi calon peminjam, untuk menentukan bunga pinjaman, dan persyaratan agunan. Proses ini membutuhkan banyak informasi, terutama informasi tentang risiko kredit. Kurangnya informasi mengenai rekam jejak kredit pada UMKM selaku pemohon dana, menyebabkan lebih banyak persyaratan jaminan untuk pinjaman ke UMKM dengan tingkat bunga pinjaman yang lebih tinggi, yang justru dapat menghambat pertumbuhan usaha. Tentu hal ini justru akan semakin mengurangi minat sekaligus menghambat UMKM untuk mengakses kredit pada lembaga keuangan. Hal ini menjadi sesuatu yang kontradiktif karena perekonomian sebagian besar negara Asia didominasi oleh bank sehingga pembiayaan pasar modal bukanlah pilihan yang realistis bagi perusahaan-perusahaan kecil dan menengah. Hal ini sejalan dengan kondisi di Indonesia, di mana hanya sebanyak 46 perusahaan UMKM terdaftar di BEI dari sekian banyak UMKM yang ada di Indonesia pada tahun 2020.

Oleh karena itu, kita perlu mencari solusi yang membuat pinjaman bank kepada UMKM lebih mudah. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah pengembangan infrastruktur informasi kredit untuk UMKM, penggunaan teknik-teknik penilaian kredit bagi UMKM untuk mengatasi masalah informasi asimetris, pengembangan skema jaminan kredit yang berkelanjutan untuk memecahkan masalah jaminan perusahaan UMKM, dan memfasilitasi evaluasi bagi UMKM untuk pembiayaan (Yoshino dan Taghizadeh-Hesary, 2018). Menurut Roy dan Saw (2021), karena UMKM dianggap tidak terorganisir dalam hal manajemen data keuangan dibandingkan dengan perusahaan besar, membuat penilaian risiko kredit berdasarkan data keuangan yang tidak memadai menjadi penyebab kekhawatiran lembaga keuangan.

Untuk mengatasi kesulitan *credit scoring* pada UMKM, Roy dan Saw (2021) memperkenalkan model penilaian kredit multikriteria. Model ini dibangun menggunakan metode *hybrid best-worst* (BWM) dan *Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS). Awalnya, BWM menentukan kriteria berat, dan TOPSIS diterapkan untuk menilai UMKM. Studi kasus kehidupan nyata dilakukan untuk menunjukkan efektivitas model yang diusulkan dan analisis sensitivitas

yang memvariasikan bobot kriteria dilakukan untuk menilai ketahanan terhadap situasi keuangan yang tidak dapat diprediksi. Temuan menunjukkan bahwa histori kredit, likuiditas kas, dan periode pembayaran UMKM adalah faktor paling penting dalam pinjaman, diikuti oleh pengembalian modal, fleksibilitas keuangan, dan integritas. Model penilaian kredit yang diusulkan mengungguli model komersial yang ada dalam hal akurasi untuk memprediksi kebangkrutan. Model ini dapat membantu lembaga keuangan, menyediakan sarana sederhana untuk mengidentifikasi UMKM potensial untuk memberikan kredit. Metode *credit scoring* multikriteria tersebut menunjukkan bahwa masih dimungkinkan bagi lembaga keuangan untuk memberikan alternatif penilaian selain penilaian yang sudah diterapkan saat ini, meskipun pada dasarnya metode multiskor yang ditawarkan oleh Roy dan Saw (2021) ini masih secara tidak langsung mensyaratkan sudah adanya riwayat pembiayaan. Hal ini akan mustahil bagi UMKM pemula atau UMKM yang tidak dapat terlacak pinjamannya karena terbiasa meminjam di sektor keuangan informal.

Credit scoring yang diterapkan lembaga keuangan formal saat ini sangat menekankan pada risiko gagalnya perusahaan yang meminjam dana dalam memenuhi prinsip *going concern*. Artinya, jika risiko ini melebihi batas toleransi,

kredit tidak bisa diberikan atau tidak lolos seleksi. Prinsip *going concern* ini adalah satu esensi dari berdirinya perusahaan termasuk UMKM, karena prinsip ini memastikan bahwa akan terus diharapkan terjadi keberlangsungan usaha setidaknya selama masa pembayaran angsuran kepada lembaga keuangan berakhir. Prinsip *going concern* ini kadang sulit tercapai bagi UMKM karena masih dianggap memiliki risiko besar untuk bubar dalam waktu pendek. Bahkan, beberapa lembaga keuangan ragu untuk memberikan pembiayaan kepada UMKM yang berusia di bawah 7 tahun. Faktor risiko yang tinggi ini dapat dikurangi oleh UMKM yang memiliki rekam jejak yang baik atau aset yang dapat digunakan sebagai agunan. Namun demikian, kebanyakan UMKM tidak memiliki agunan. Selain itu, karena mereka tidak pernah mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal sebelumnya, mereka tidak memiliki rekam jejak. Kondisi ini menyebabkan siklus negatif: UMKM yang tidak memiliki rekam jejak atau agunan yang memadai tidak dapat mendapatkan pembiayaan, sehingga mereka tidak dapat membangun rekam jejak yang baik. Siklus buruk ini tidak akan berhenti dan UMKM tidak akan bisa mendapatkan pembiayaan.

Kondisi ini mirip dengan pertikaian sederhana “lebih dulu mana, ayam apa telur?” yang tak pernah ada penyelesaian.

Akhirnya, masalah tidak terselesaikan tetapi justru malah memberikan efek bola salju. Demikian halnya antara masalah pembiayaan dan rekam jejak yang bergulir pada UMKM sehingga UMKM selamanya tidak akan bisa mendapatkan pembiayaan. Untuk memutus siklus buruk ini, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membuat rekam jejak yang baik bagi UMKM adalah melalui *alternative credit scoring* (ACS) sebagaimana yang disampaikan (Rahmansyah, 2023) melalui Laporan Ekonomi dan Keuangan Mingguan BKF periode 11-17 September 2023. ACS adalah proses scoring kredit yang menggunakan informasi alternatif selain informasi perkreditan, seperti rekam jejak media sosial, riwayat pembelian di platform *e-commerce*, dan tagihan telekomunikasi. ACS memang bukan sesuatu yang baru; kemunculannya bahkan dapat dikaitkan dengan tahun 1990-an. Namun demikian, ACS lebih sering digunakan oleh lembaga non-keuangan, seperti perusahaan telekomunikasi untuk membuka rekening baru bagi orang-orang yang belum terdaftar, dan lembaga keuangan yang lebih kecil.

Menurut Njuguna dan Sowon (2021), ukuran dalam ACS sangatlah luas. Bidang ini muncul dan mendapatkan popularitas karena memiliki peran penting dalam penyediaan dan penggunaan data alternatif

untuk mempercepat inklusi keuangan. Secara historis, mengevaluasi kredibilitas membutuhkan ketersediaan aktivitas keuangan masa lalu seperti pembayaran pinjaman. Persyaratan ketat seperti itu membuat orang dengan sedikit atau tidak ada riwayat keuangan mengambil ‘*credit invisible*’. Kemajuan dalam kecerdasan buatan dan *machine learning* telah memungkinkan algoritma skor untuk bekerja dengan data non-finansial seperti jejak digital dari perangkat seluler dan data psikometrik untuk menghitung skor kredit. Sesuai hasil penelitian Djeundje (2021), ratusan juta orang di negara dengan ekonomi berpenghasilan rendah tidak memiliki akses pada pembiayaan bank karena mereka memiliki riwayat kredit yang tidak mencukupi untuk *credit scoring*. Tanpa data alternatif, jenis data yang biasanya tersedia adalah data demografis. Model *alternative credit scoring* yang berisi penggunaan email dan variabel psikometri, serta variabel demografis, dapat memberikan akurasi prediktif yang lebih besar daripada model yang hanya menggunakan data demografis. Dengan pertukaran data antar institusi yang lebih baik serta kemudahan dalam menarik data, ACS dapat diterapkan apabila infrastruktur berupa *system, people, dan technology* telah disiapkan.

Pentingnya ACS juga disampaikan oleh Huang et al. (2023) yang menggunakan

1,8 juta transaksi pinjaman untuk pedagang *online* dari bank terkemuka di Tiongkok. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara pendekatan BigTech (yaitu model *big data* dan *machine learning*) dan pendekatan bank (yaitu data keuangan tradisional dan model *credit scoring*) dalam memprediksi *default* pinjaman. Apabila diamati, pendekatan BigTech yang dimaksud di sini adalah pendekatan ACS yang dimaksud oleh BKF karena terdapat persamaan karakter data referensi *scoring* yang digunakan, yakni nonkredit. Ternyata, pendekatan BigTech lebih baik memprediksi *default* pinjaman, lebih mencerminkan informasi, dan lebih memodelkan keuntungan. Meskipun pendekatan perbankan baik untuk perusahaan yang memiliki

catatan kredit, informasi milik BigTech dapat melengkapi atau, bilamana perlu, menggantikan riwayat kredit dalam memprediksi *default*, terutama untuk peminjam nonbank.

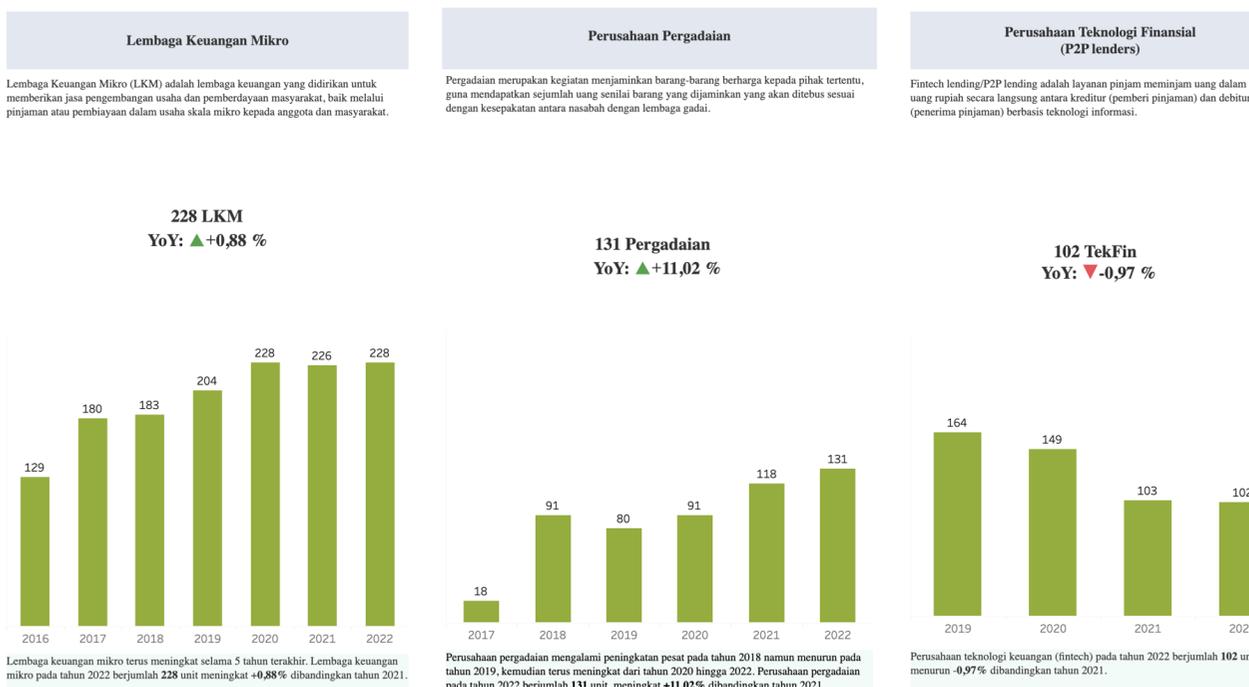
Kesesuaian BigTech untuk menilai kelayakan pinjaman nonbank sebagaimana disampaikan di atas, menunjukkan bahwa sektor nonbank juga dapat memanfaatkan ACS untuk mendukung UMKM dalam mengakses pembiayaan. Lembaga keuangan alternatif yang kini dapat memfasilitasi UMKM semakin dapat mendapatkan akses pembiayaan adalah Fintech. Fintech adalah layanan pinjam-meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (penerima

pinjaman) berbasis teknologi informasi. Sesuai dengan Gambar 2, Fintech terus mengalami penurunan dalam jumlah. Pada akhir tahun 2022, jumlahnya menurun menjadi 102 dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 164. Dengan adanya kesempatan untuk membiayai UMKM, diharapkan keberadaan Fintech yang sekarang menurun juga akan semakin diharapkan berkembang karena jumlah UMKM yang cukup banyak untuk dapat dijadikan lahan bisnis Fintech.

Mengembangkan kemampuan untuk menganalisis penilaian risiko

Ketidakpastian data keuangan yang didasarkan pada ukuran risiko kredit konvensional merupakan tantangan

Gambar 2. . Lembaga Keuangan Alternatif



Sumber: Kemenkop UKM (2023)

tambahan bagi perusahaan Fintech dalam memenuhi kebutuhan pelanggan mereka yang memiliki akses terbatas ke fasilitas kredit lembaga keuangan. UMKM sulit untuk dinilai risiko kreditnya karena memiliki keterbatasan riwayat kredit yang baik atau hutang yang sedikit. Selain itu, pelaku UMKM biasanya tidak memiliki catatan kerja formal yang menunjukkan kemampuan untuk membayar kembali pinjaman, dan biasanya tidak memiliki properti atau aset yang dapat digunakan sebagai jaminan. Namun demikian, hal ini tidak menunjukkan bahwa segmen UMKM ini tidak memiliki nilai kredit atau tidak membutuhkan pembiayaan dari pihak luar untuk lebih berkembang. Semakin banyak orang menggunakan data non-finansial, seperti riwayat pembayaran tagihan utilitas dan telekomunikasi, sebagai alternatif untuk mendapatkan informasi tentang penilaian kredit.

Di Tiongkok, salah satu Fintech yaitu 007fenqi membuat ACS dengan sistem penilaian kreditnya sendiri. Perusahaan telah memanfaatkan keahlian dan pengalaman karyawannya dalam *underwriting* perbankan untuk mengadopsi dan meningkatkan prosedur yang telah ditetapkan untuk kartu kredit. Sistem penilaian kredit lebih komprehensif dibandingkan dengan bank-bank tradisional. Sementara itu, sebagian besar pesaing bekerja dengan setidaknya satu atau dua perusahaan *big*

data, 007fenqi sudah bekerja dengan enam penyedia big data. Strategi ini berbeda dengan sistem perbankan konvensional yang sangat tertutup dan tidak dapat bekerja dengan perusahaan *big data*.

Sistem milik 007fenqi terhubung dengan beberapa penyedia data eksternal termasuk: 1) CHSI: lembaga yang ditunjuk pemerintah China yang menyediakan layanan verifikasi catatan pengguna; 2) Sesame Credit: cabang keuangan Alibaba yang menyediakan skor kredit berdasarkan data pengguna yang dihitung berdasarkan riwayat pembayaran, pola perilaku, kemampuan pembayaran, identitas, dan jaringan sosial; 3) Tongdun: perusahaan data besar yang menyediakan layanan kontrol risiko anti-penipuan dan data seperti apakah pengguna telah mengajukan permohonan pinjaman di beberapa platform online; dan 4) Shanghai Credit Information dan Allwin Credit: platform berbagi informasi kredit mikro yang menyediakan data seperti jumlah pinjaman saat ini dan sebelumnya, aplikasi yang ditolak, dll. (Leong et al., 2017).

Saat ini, pemerintah dan lembaga yang berwenang di Indonesia sedang bekerja untuk meningkatkan aksesibilitas data UMKM. ACS akan menjadi bagian dari ketersediaan data bersama dengan (1) pusat data UMKM nasional, yang saat ini

dibangun oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya; (2) basis data informasi perkreditan publik; dan (3) Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP). Pemerintah juga memiliki Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), yang berfungsi sebagai basis data informasi perkreditan publik. SIKP menyimpan informasi dan data tentang kredit. Jika keempat komponen tersebut dapat diintegrasikan dengan baik, sangat mungkin untuk menghasilkan data UMKM yang lengkap dan akurat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ACS memiliki peluang yang besar untuk dapat meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM apabila semua komponen yang terlibat dapat berkolaborasi.



Foto: Kadin

Carmelita Hartoto

Hilirisasi untuk Percepatan Transformasi

Indha Sendary¹⁴

Indonesia memiliki aspirasi untuk menjadi negara maju di tahun 2045. Cita – cita tersebut menurut beberapa lembaga internasional, dapat dicapai sesuai dengan target pemerintah. Dengan berbagai *resource*, seperti sumber daya manusia yang cukup banyak dengan mayoritas merupakan usia produktif dan sumber daya alam yang melimpah, serta fundamental ekonomi yang cukup baik, menjadi bekal Indonesia untuk mencapai tujuan jangka panjang menjadi Indonesia Maju tepat di 100 tahun usia kemerdekaan Indonesia.

Tidak banyak negara yang memiliki kombinasi berbagai *resource* seperti Indonesia.

Untuk itu, diperlukan bauran kebijakan untuk mendukung pencapaian tersebut melalui transformasi ekonomi. Upaya dalam melakukan transformasi tersebut telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya dengan hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA). Seperti apa upaya yang telah dilakukan Pemerintah saat ini untuk mendukung percepatan hilirisasi tersebut? Apa kah upaya tersebut sudah cukup membantu industri sebagai aktor utama dalam hilirisasi? Pada Warta Fiskal kali ini, tim redaksi Warta Fiskal mewawancarai Carmelita Hartoto, Ketua Kelompok Kerja Minerba, Kamar Dagang

dan Industri Indonesia (Kadin).

Hilirisasi merupakan kebijakan positif dalam rangka memberikan nilai positif bagi ekonomi negara. Menurut Carmelita, banyak manfaat yang akan diperoleh Indonesia dengan adanya hilirisasi, yaitu produk – produk yang lebih bernilai tambah, adanya penguatan struktur industri, penciptaan lapangan kerja, dan peluang usaha.

Melihat manfaatnya yang besar bagi negara, maka kebijakan ini perlu didukung oleh semua pihak. Selain pemerintah, KADIN Indonesia sebagai organisasi pengusaha yang menjadi salah satu

¹⁴Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

penggerak ekonomi, membuat kelompok kerja (pokja) hilirisasi minerba yang terdiri dari pelaku industri, asosiasi, & tenaga ahli.

“Saat ini, upaya hilirisasi yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia tampaknya berjalan sesuai jalurnya (*on the track*). Pemerintah juga sudah berupaya menyusun peta jalan hilirisasi minerba atau SDA sehingga bisa menjadi panduan bersama seperti peta jalan hilirisasi batubara yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah di tahun 2021 lalu. Sementara untuk komoditas pertambangan mineral memang masih perlu dirumuskan satu per satu karena begitu beragam. Meskipun bisa dikatakan sudah cukup baik dan *on the track* namun perlu dilakukan evaluasi terus-menerus untuk memastikan efektivitasnya dan menyesuaikan strategi sesuai dengan perkembangan terkini”, ujar wanita yang juga menjadi Ketua Indonesian National Shipowner's Association (INSA) ini.

Carmelita pun melanjutkan bahwa kebijakan hilirisasi adalah kebijakan yang penuh dengan tantangan. Tantangannya tidak hanya dari dalam negeri, tapi juga negara lain. Untuk itu, dibutuhkan keberanian pemerintah untuk tetap terus menjalankan program ini. “Selain itu, kita butuh komitmen. Komitmen tidak hanya dalam hal semangat menjalankan hilirisasi, tapi juga komitmen dengan memberikan kebijakan



dan aturan lanjutan yang mendorong semakin cepatnya hilirisasi bisa berjalan”, terangnya.

Ia pun menambahkan bahwa kebijakan terkait hilirisasi harus didukung dengan adanya kepastian landasan hukum dan konsistensi kebijakan dari tingkat pusat hingga ke lapangan di daerah-daerah. Kemudian, perlu adanya investasi dalam riset dan teknologi, pengembangan SDM, serta kerjasama yang erat antara pemerintah dan sektor swasta.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah kolaborasi dengan seluruh masyarakat. “Agar transformasi ekonomi melalui hilirisasi bisa berjalan

lebih cepat. Kebijakan besar ini perlu merangkul seluruh elemen anak bangsa, salah satunya para pelaku usaha”, lanjutnya.

Carmelita mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki SDA yang memang luar biasa. Menurut Data Ditjen Minerba, cadangan Nikel Indonesia merupakan yang terbesar di dunia dengan porsi mencapai 22% dari cadangan global. Hilirisasi nikel saat ini sudah berjalan dengan sangat bagus. Cadangan emas kita kelima terbesar di dunia dengan porsi mencapai 5% dari cadangan global. Sementara, cadangan tembaga dan bauksit Indonesia berada di nomor 10 dan 6 di dunia

dengan porsi sebesar 3% dan 4% dari total cadangan global. Tak hanya itu, Indonesia juga memiliki komoditas unggulan lainnya seperti CPO maupun batubara. Jadi secara modal komoditas kita ini sudah cukup untuk jadi salah satu pemain utama dalam perdagangan global.

“Melalui Peta Jalan Indonesia Emas 2045, Kadin sudah menyusun rekomendasi ekosistem *electric vehicle* (EV) yang komprehensif mulai dari *nickel mining, ride ecosystem platform, hingga charging infrastructure*, sehingga diharapkan kita bisa menjadi bagian dari rantai pasok global”, tambahnya.

Dalam kaitan dengan kebijakan fiskal yang saat ini, para pengusaha mengharapkan adanya dukungan pemerintah seperti insentif fiskal pemotongan pajak. Hal ini berguna untuk menjadi stimulan bagi pelaku usaha dalam mengadopsi teknologi-teknologi yang dapat mengurangi emisi karbon dan menghasilkan komoditas yang lebih bernilai tambah karena teknologi baru dan peralatan baru itu membutuhkan *capital-intensive*.

Dari sisi kebijakan non-fiskal yang dibutuhkan terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang dikenakan kebijakan retensi sebesar 30% yang sangat berdampak pada komoditas pertambangan, diantaranya adalah komoditas yang sudah melalui proses hilirisasi. Para pelaku usaha berharap bahwa agar

Pemerintah bisa melakukan penyesuaian terhadap DHE yang sudah dikonversi ke rupiah sehingga tidak perlu dilakukan retensi.

Sementara itu, dari sisi tantangan ada beberapa tantangan yang saat ini masih dihadapi. Misalnya, serapan pasar dalam negeri dari komoditas yang diolah di dalam negeri. Kesiapan smelter sebagai tempat pengolahan *raw material* menjadi barang jadi atau setengah jadi, dan lainnya. Kita perlu mempersiapkan SDM kita untuk menjadi tenaga kerja di sektor industri.

Selain itu, tantangan dalam menjalankan hilirisasi lainnya melibatkan kompleksitas proses, biaya produksi yang tinggi, dan perubahan dalam rantai pasok. Program hilirisasi ini juga banyak melibatkan investor global karena ketidaksiapan investor dalam negeri sehingga perlu dibangun kesiapan pelaku usaha dan investor dalam negeri untuk terlibat dalam rantai pasok. Diperlukan inovasi dan dukungan pemerintah untuk mengatasi hambatan tersebut diantaranya untuk memfasilitasi transfer teknologi, peningkatan kapasitas SDM dan membangun infrastruktur yang dibutuhkan.

Banyak negara yang telah lebih dahulu menjalani hilirisasi, bahkan sejak puluhan tahun lalu. Ada negara yang kebijakan hilirisasinya sukses memberikan nilai tambah bagi

negaranya, tapi ada juga yang masih terus berusaha agar hilirisasi bisa berjalan.

Negara yang sukses melakukan hilirisasi itu misalnya, Tiongkok dengan komoditas batu bara, bijih besi, bauksit, timah. Hilirisasi di Tiongkok sukses karena pengembangan industri lokal, adanya kebijakan tata kelola (permodalan), adanya investasi besar dan infrastruktur, dan adanya riset dan pengembangan.

Begitu juga dengan Australia yang sukses hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, batu bara dll. Australia bisa sukses karena adanya pengembangan sumberdaya, investasi yang dilakukan pada teknologi dengan pendekatan ESG, investasi dan infrastruktur serta memberikan investasi kompetitif.

Success story negara tersebut mestinya bisa kita contoh, bagaimana kebijakan hilirisasi ini harus dibangun dan didukung oleh kebijakan lainnya. Industri berharap agar Pemerintah terus mendukung hilirisasi SDA dengan menciptakan kebijakan yang kondusif, memberikan insentif untuk inovasi dan investasi, serta mempertahankan dialog yang terbuka antara pemerintah, industri, dan lembaga internasional. Dengan demikian, proses hilirisasi dapat berjalan sesuai tujuan untuk mendorong ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya tahan tinggi.



Miss Diplomasi Presidensi G20 Indonesia

Rosyid Bagus Ginanjar¹⁵

Di pinggiran pantai Oriental Kota Wellington, seorang perempuan duduk termenung sambil memandangi bunga berwarna ungu yang digenggamnya. Bola matanya terlempar jauh ke arah biru lautan, tampak indah dengan kilau gulungan ombak. Kenangan manis akan *teaser* tugas belajar 4 bulan di Selandia Baru masih membekas jelas dalam ingatan Ariadne Mael Novariani Putri. Mindset

lifelong learning mendorong Adne untuk memandangi setiap pengalaman dan penugasan pekerjaan sebagai sarana pembelajaran. Prinsip itu berbuah manis kala ia menyabet penghargaan Nagara Dana Ksatria Inspirasi 2023 dari Menteri Keuangan RI.

Setelah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tahun 2013 dengan predikat memuaskan, Adne memulai langkah dengan berkarir di Badan

Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Tak hanya sekadar melanjutkan ikatan dinas, ia juga memiliki impian besar: menjaga asa Indonesia melalui jalur diplomasi. Di BKF, Adne terlibat langsung dalam beragam kegiatan di Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral.

Bagi Adne, hidup bukan hanya seputar rutinitas harian. Tindakannya didasarkan pada rasa peduli yang mendalam terhadap kepekaan sosial.

¹⁵Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

Di sela aktivitas harian sebagai ASN, Ia tergabung dalam relawan Tim Kurikulum Komunitas Sahabat yang memperkenalkan nilai budi pekerti pada anak-anak usia sekolah dasar di Marunda, Bekasi. Adne bercerita tentang hangat perasaan hatinya tiap kali selesai mengajar di Marunda. Ia percaya bahwa budi pekerti adalah modal utama untuk mencapai cita-cita dan menjalani arah hidup.

Kontribusi Tiada henti

Sebagai seorang *Research Economist* yang baru saja pulang dari tugas menantang di kantor *International Monetary Fund (IMF)* Jakarta tahun 2021, Adne menerima amanah baru sebagai staf di Kelompok Kerja (Pokja) G20. Menurut Adne, kesuksesan Indonesia menyelenggarakan Presidensi G20 di masa yang penuh tantangan merupakan pencapaian terbesarnya selama bekerja. Pencapaian ini tidak lepas dari kondisi prasyarat kesuksesan: upaya

kolaboratif berbagai pihak. Inilah salah satu *lesson learned* berharga yang ia dapatkan selama menjalankan tugas sebagai Tim Substansi Presidensi G20 Indonesia.

Saat pertama kali bergabung dengan Pokja G20, Adne menyadari pentingnya pemetaan pekerjaan untuk menyelesaikannya tepat waktu. Ia kemudian berinisiatif dengan menyusun sistem monitoring pekerjaan sederhana dengan menggunakan *collaborative tools* dengan menggabungkan sumber dari berbagai surat, email, dan dokumen G20. Inisiatif ini bukan hanya diterima baik oleh anggota Pokja tetapi juga disepakati untuk dilaksanakan secara bergiliran antar staf.

Selama penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia, Adne mendapatkan 3 amanah dari pimpinan yakni menyusun matriks pemetaan posisi negara G20, mendukung penyusunan bahan substansi

pertemuan G20, dan mengkoordinasikan keperluan bilateral dengan mitra G20.

Matriks pemetaan posisi negara G20 merupakan salah satu sumber penting pengambilan keputusan pimpinan saat pertemuan G20 dilaksanakan. Berbekal pengalaman menyusun *verbatim* dan bantuan *G20 secondees*, Adne bersama Tim Pokja G20 menyusun matriks secara *live* sesuai intervensi anggota G20. Tugas berikutnya adalah mendukung penyusunan bahan substansi pertemuan G20.

Berperan sebagai *proofreader*, Adne aktif berkolaborasi dengan anggota Pokja untuk menyusun *issue notes* dan *communiqué G20* secara kolektif berdasar pembagian isu yang telah disepakati. Tahap ini perlu memastikan ketelitian dokumen, apakah sudah memiliki kualitas yang optimal dan mewakili pandangan bersama dari seluruh anggota G20. Adne mendapatkan amanah pimpinan untuk menjadi *focal point* Indonesia dalam mengkoordinasikan keperluan bilateral dengan mitra G20. Penugasan inilah yang membawa namanya berkibar di atas meja pribadi Sri Mulyani Indrawati.

Inspirasi dari Puncak Rinjani

Di tengah kesibukannya mempersiapkan pertemuan Presidensi G20 Indonesia, Adne menyempatkan diri untuk rehat sejenak sebagai upaya *work-life balance*. Ia



“Damai adalah sikap yang tenang dalam situasi gaduh dan suasana hati yang sejuk dalam kondisi yang panas”

memilih Gunung Rinjani di Lombok untuk melepaskan penat yang bergumul di kepalanya selama dua tahun belakangan. Butuh waktu 4 hari 3 malam untuk menakhlukan Puncak Rinjani 3726 mdpl dan menikmatiindahnyasembalun dan Torean dengan berjalan kaki.

“Damai adalah sikap yang tenang dalam situasi gaduh dan suasana hati yang sejuk dalam kondisi yang panas,” ungkap penyuka bunga matahari itu.

Setiap langkah petualangan adalah tantangan yang menyenangkan. Rinjani memberikan tambahan nutrisi dan inspirasi bagi

Adne untuk melaju kencang meraih kemenangan hidup. Ia jadikan tapak demi tapak saat melintasi padang savana dan tiupan angin kencang selama perjalanan sebagai semangat tambahan agar mampu mendaki lebih tinggi lagi. Tak ubahnya pertemuan G20 yang puncaknya semakin di depan mata.

Diskusi G20 yang dinamis dan tensi geopolitik yang semakin memanas menuntut Indonesia selaku Presidensi G20 tahun 2022 untuk semakin menunjukkan peran tidak hanya sebagai *leader* tetapi juga sebagai *mediator*. Upaya yang dilakukan Indonesia adalah mendengarkan pendapat berbagai pihak, termasuk melalui upaya mengundang Ukraina untuk hadir dalam pertemuan tingkat Menteri G20 sebagai *invitee* dan mendorong anggota G20 untuk mencapai *common or middle grounds* atas berbagai isu prioritas.

Untuk alasan inilah,

pendekatan bilateral yang spesifik untuk setiap negara sangat penting untuk dilakukan. Melalui koordinasi intens dengan berbagai pihak dan bimbingan pimpinan serta dukungan rekan kerja, Adne sebagai *focal point* Indonesia dengan mitra G20 berhasil mengkoordinasikan setidaknya 193 kali pelaksanaan pertemuan bilateral G20 selama tahun 2022. Pertemuan bilateral ini menjadi salah satu kunci G20 dalam mencapai *deliverables* paling konkret di tahun 2022: pembentukan *the Pandemic Fund* dan *Country Platform Energy Transition Mechanism (ETM)*.

Seperti seorang pendaki, menunduk saat mendaki kemudian tegak saat turun. Pengalaman menjadi presidensi G20 merupakan bekal untuk memperkuat diplomasi Indonesia yang tidak boleh lewat begitu saja. Setelah presidensi G20 berakhir, Adne turut serta berperan aktif dalam mensosialisasikan pengalaman berdiplomasi di G20 melalui artikel-artikel dan berbagai sesi diskusi formal dan informal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hasil positif yang telah dicapai dan mengawal proses G20 selanjutnya.

Adne mendapat tiga pelajaran berharga dari perannya dalam Tim Substansi G20. Pertama, ia menyadari bahwa substansi harus didukung oleh diplomasi yang efektif. Hal ini mendorongnya untuk





terus mengembangkan diri dan kemampuan diplomasi ekonomi bahkan melalui rencana studi di bidang Hubungan Internasional. Kedua, ia merasakan bahwa rejeki dan nikmat dalam pekerjaan tidak hanya berupa materi melainkan juga lingkungan kerja yang sehat dan rekan kerja serta pimpinan yang suportif. Ketiga, Adne menyadari bahwa tidak semua orang memiliki kesempatan untuk melakukan peran yang besar, tetapi semua orang memiliki kemampuan untuk melakukan peran kecil dengan cinta yang besar.

Courage and a Little Bit of Insanity

Kisah sukses Adne menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang di lingkungan

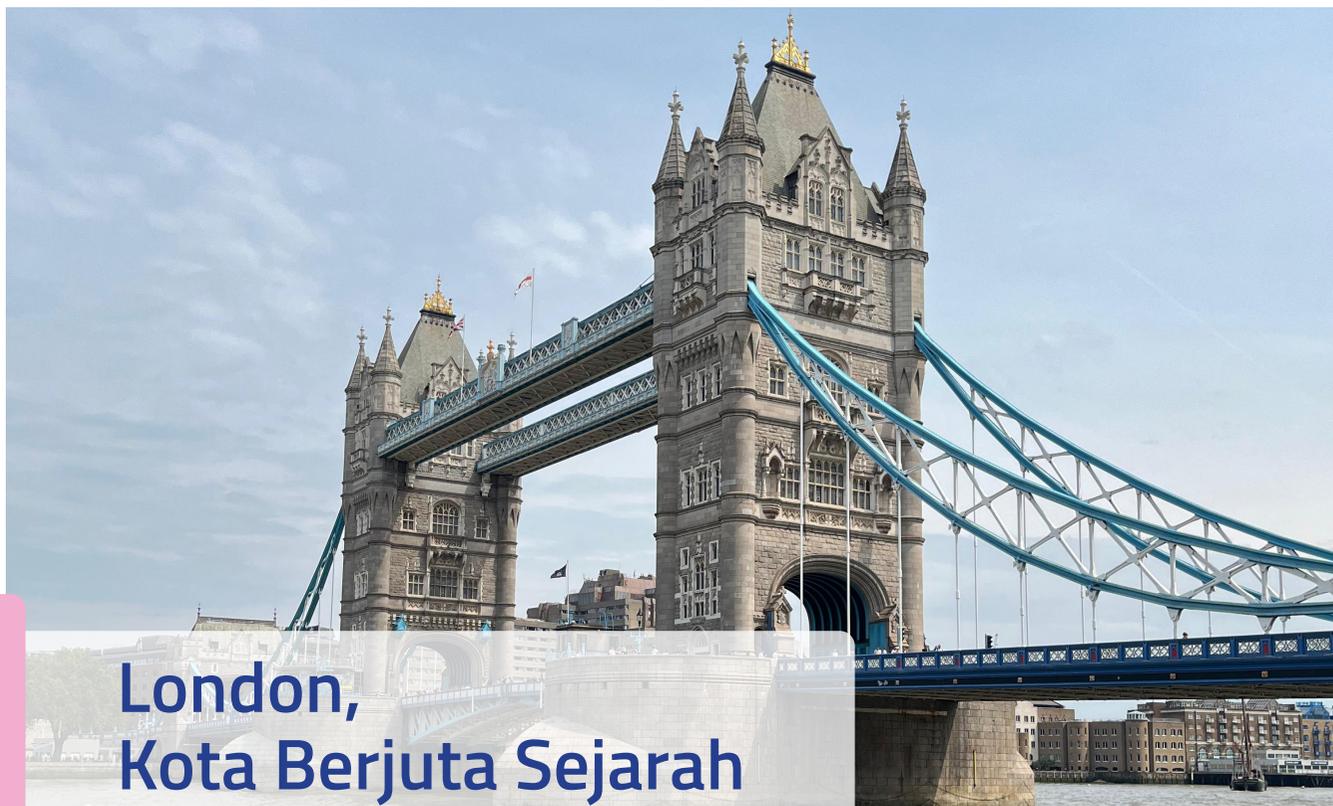
sekitarnya. Melalui seminar, workshop, dan kegiatan komunitas, Adne berbagi pengalaman dan pengetahuannya. Dalam kapasitasnya sebagai pegawai perempuan yang berusia muda, ia memotivasi generasi muda untuk mengejar impian mereka tanpa terhalang oleh norma sosial atau stereotip gender.

"It's a man's man's man's world tetapi dunia ini butuh lebih banyak peran perempuan di berbagai bidang, termasuk dalam diplomasi dan pekerjaan sosial. Saya percaya bahwa perempuan punya potensi untuk membuat perubahan. It just took courage and maybe .. a little bit of insanity" ucap Adne dengan penuh keyakinan dan tawa.

Dalam cahaya gemerlap

kota, kisah inspiratif Ariadne Mael menjadi pelajaran hidup bagi banyak orang. Kesuksesannya bukan hanya tentang penugasan yang diselesaikannya, tetapi juga tentang semangat kolaboratif, kerja tim, dan dedikasi tinggi yang melekat pada setiap usaha. Adne tetap rendah hati.

"Ini bukan tentang saya, tetapi tentang kita semua. Kita dapat mencapai lebih banyak hal ketika bekerja bersama dan melibatkan semua pihak," pungkas penikmat garis keras makanan khas Cirebon Tahu Gejrot tersebut.



London, Kota Berjuta Sejarah

Wignyo Parasian¹⁶

"London, London, ingin ku ke sana".

Sepenggal lagu Hijrah ke London dari The Changcuters ini selalu melekat di kepala penulis sejak pertama kali mendengarnya. Bukan hanya lagunya yang memanjakan telinga, tetapi berkunjung ke negara The Royal Family ini memang menjadi salah satu *bucketlist* dalam hidup. Mulai dari sejarah yang panjang hingga romansa yang tersimpan di dalamnya, London menawarkan pesona serta kesan tersendiri bagi setiap yang menikmatinya, termasuk bagi penulis secara pribadi. Kebetulan di tahun ini penulis mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan

di Inggris, tepatnya di University of Nottingham. Kampus ini memang bukan di London, namun jarak dari tempat penulis menjalani studi sesungguhnya tidak begitu jauh, cukup 2 jam dengan menggunakan kereta atau 3,5 jam dengan bus.

London ini sejatinya merupakan kota yang besar. Dibandingkan dengan wilayah Jabodetabek, metropolitan London masih memiliki area sedikit lebih luas. Namun, kota ini ditunjang dengan beragam transportasi yang sangat memadai, mulai dari taksi, bus merahnya yang ikonik, kereta *overground*, kereta *underground* yang dikenal dengan nama *tube*, *boat* yang melintasi

Sungai Thames, hingga sewa sepeda. Tidak hanya itu, sistem transportasi pun saling terkoneksi satu sama lain dan menjangkau hingga kota-kota di pinggiran London sekalipun. Sehingga, berpetualang di London dengan menggunakan transportasi umum sangatlah nyaman serta mudah, terlebih beberapa lokasi stasiun maupun halte di kota ini sangat dekat dengan berbagai tempat yang menarik bagi para wisatawan.

Bagi kalian yang senang berjalan kaki, mengeksplorasi City of London, atau dapat dikatakan wilayah sentralnya London, akan memberikan pengalaman sangat menyenangkan. Banyak

¹⁶Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal



Gambar 1. Trafalgar Square (Sumber: Dokumen pribadi)

tempat maupun sudut-sudut ibukota yang *instagrammable* dan mungkin terlewatkan apabila kita menggunakan bus, terlebih *tube* yang berada di bawah tanah. Apabila kalian berkesempatan untuk berkunjung ke London dan ingin mencobanya dengan berjalan kaki, penulis merekomendasikan untuk memulainya dari Trafalgar Square, sebuah alun-alun di tengah Kota London untuk mengenang kemenangan Laksamana Horatio Nelson pada Pertempuran Trafalgar di tahun 1805. Trafalgar Square sendiri acap kali dijadikan tempat untuk bersantai, *public gathering*, ataupun konser. Selain itu, di dekat alun-alun tersebut terdapat The National

Gallery yang menyimpan berbagai koleksi lukisan dari seluruh dunia.

Selesai dari Trafalgar Square, kalian dapat melanjutkan



Gambar 2. Buckingham Palace

perjalanan ke Buckingham Palace, istana yang menjadi kediaman resmi Kerajaan Britania Raya sekaligus tempat untuk melaksanakan acara kenegaraan ataupun menyambut tamu negara. Ketika menuju ke sana, jangan lewatkan untuk menyusuri jalan The Mall yang merupakan rute seremoni The Royal Family ketika datang ke Buckingham Palace. Di ujung jalan tersebut, kalian akan disambut oleh Victoria Memorial sebelum akhirnya melihat kemegahan Buckingham Palace. Istana ini sebenarnya baru secara resmi menjadi kediaman keluarga kerajaan pasca pengangkatan Ratu Victoria pada tahun 1837. Sebelumnya, gedung ini merupakan sebuah balai kota yang didirikan untuk Duke of Buckingham dan kemudian dipergunakan oleh Raja George III sebagai rumah pribadinya.

Setelah puas menikmati Buckingham Palace, beranjaklah menuju



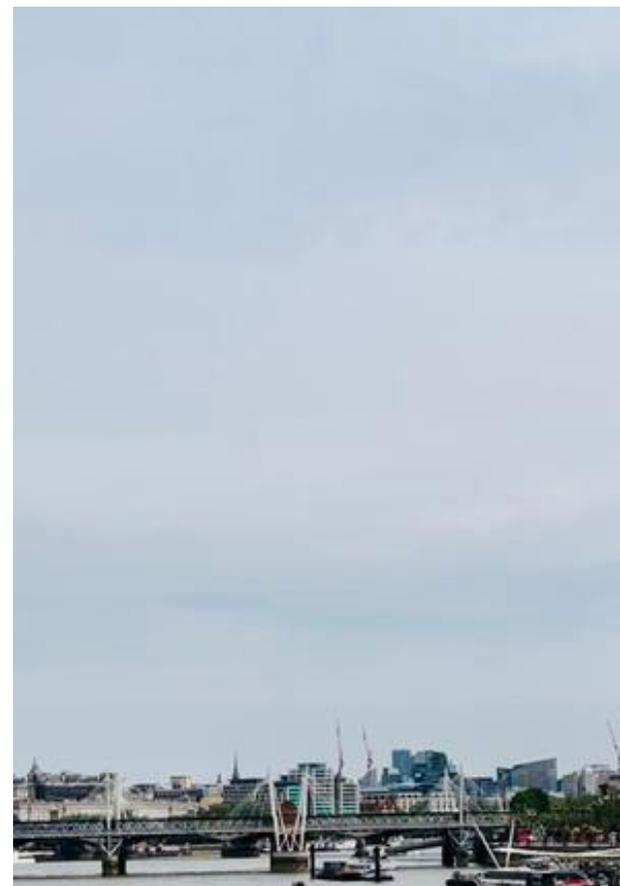
Gambar 2. Big Ben

Westminster Abbey, sebuah gereja yang menjadi tempat pengangkatan raja maupun ratu Inggris, pernikahan keluarga kerajaan, hingga tempat pemakaman. Untuk pergi ke sana, kalian dapat berjalan melewati St. James Park sambil menghirup udara segar ataupun duduk sebentar beristirahat sambil melihat danau. Terkadang kalian dapat melihat polisi berkeliling di taman tersebut dengan menggunakan kuda. Di dekat Westminster Abbey, kalian akan melihat Palace of Westminster, tempat yang dikenal sebagai pusat dunia perpolitikan di Britania Raya. Di gedung inilah parlemen Britania Raya, yakni House of Commons dan House of Lords, mengadakan rapat maupun pertemuan, mirip-

mirip dengan gedung MPR/ DPR di Indonesia. Oleh karena baik secara sejarah maupun simbolnya yang begitu signifikan, kedua bangunan ini dinobatkan sebagai bagian dari UNESCO World Heritage Site.

Kalau sudah ke Inggris, tidak lengkap rasanya tanpa melihat Big Ben yang menjadi magnet bagi para wisatawan untuk berfoto dan *posting* di media sosialnya. Lokasinya sendiri tidak jauh dari Palace of Westminster, hanya sekitar 5 menit jalan kaki untuk sampai di bawah Big Ben. Sesungguhnya menara ini memiliki nama resmi Clock Tower, namun sejak tahun 2012 namanya berganti menjadi Elizabeth Tower untuk memperingati 60 tahun kepemimpinan Ratu

Elizabeth II. Ada beberapa rekomendasi spot jika kalian ingin mengambil foto ataupun video dengan latar Big Ben. Pertama, spot paling umum yakni foto di Jembatan Westminster, penulis rasa semua pasti mengetahuinya. Kedua, kalian dapat berjalan menuju Parliament Square Garden, dimana nanti kalian dapat bonus latar Palace of Westminster. Ketiga, dan ini menjadi favorit penulis, kalian dapat menyeberangi Jembatan Westminster dan turun ke arah Queen's Walk. Tempat tersebut penulis rasa merupakan *sweet spot* karena selain mendapatkan latar Big Ben dan Palace of Westminster, kalian



Gambar 3. London Eye

juga dapat mendapatkan keindahan Sungai Thames. Terakhir, cobalah datang dari dalam stasiun *tube* Westminster untuk melihat kemegahan Big Ben dari sudut pandang berbeda.

Tuntas sudah menikmati kegagahan Big Ben, alihkan langsung mata kalian untuk melihat London Eye, salah satu bianglala terbesar di dunia. Pergilah menuju Queen's Walk yang telah penulis sebutkan sebelumnya dan kalian akan langsung menemukan London Eye. Kalian dapat menikmati bianglala ini selama kurang lebih 30 menit dengan harga sekitar 500-600 ribu Rupiah. Tidak hanya itu, kalian juga



Gambar 2. Tower Bridge

dapat mencicipi *river cruise* di Sungai Thames yang merupakan sungai terpanjang di Inggris dan telah beroperasi sejak zaman Kerajaan Romawi menjajah Britania. Jangan berhenti sampai di situ dan lanjutkan perjalanan kalian di Queen's Walk karena di sana terdapat beberapa tempat menarik yang layak untuk dikunjungi, misalnya National Theatre, Tate Modern, dan Shakespeare's Globe.

Jika kaki-kaki kalian sudah lemas berjalan, jangan khawatir karena kalian dapat berhenti sejenak di Borough Market, *food markets* terbesar dan tertua di London yang sudah berdiri sejak abad ke-12. Dari Shakespeare's Globe kira-kira dibutuhkan waktu sepuluh menit untuk berjalan kaki. Terdapat beragam makanan di sana, mulai dari

makanan lokal, Asia, hingga Eropa, semua ada di sana dengan harga yang relatif terjangkau. Namun, biasanya untuk cari tempat duduk di sana cukup sulit karena pasar ini ramai sekali dengan pembeli. Rekomendasi penulis yakni carilah tempat jus di sana karena selain jusnya segar, biasanya sampai di sana tenggorokan sudah haus. Selain itu, di sana banyak makanan berasal dari Asia yang layak untuk dicoba.

Perut sudah terisi saatnya melanjutkan kembali perjalanan. Sekitar lima menit berjalan kaki, kalian akan melihat London Bridge. Sebagian dari kita acap kali salah paham dan bertanya-tanya "Kok kayaknya jembatannya biasa saja? Bukannya jembatan ini terkenal dengan



kemegahannya dan menjadi salah satu ikon London?" Ternyata yang sering kita anggap London Bridge itu sebenarnya bernama Tower Bridge, namun London Bridge ini tetap menyimpan segudang sejarah di baliknya. Sedikit cerita, London Bridge pada abad pertengahan ini dahulu merupakan sebuah jembatan yang di atasnya berdiri sebuah gereja, menara, serta rumah-rumah yang merupakan salah satu tempat perbelanjaan utama di London pada masanya. Namun, akibat abrasi dari ombak sungai serta beberapa kebakaran hebat yang terjadi di jembatan tersebut, pemerintah memutuskan untuk meruntuhkan seluruh bangunan di atasnya dan membangun London Bridge yang baru dengan posisinya yang agak bergeser sedikit dari semula. Jika kalian ingin melihat bekas peninggalan Old London Bridge, kalian dapat mengunjungi Gereja St. Magnus-the-Martyr yang berada di sisi lain jembatan tempat kalian saat ini berdiri.

Usai napak tilas sedikit masa lalu dari London Bridge, lanjutkanlah langkah kaki kalian selama kurang lebih 15 menit untuk menemukan Tower Bridge yang telah penulis singgung sebelumnya. Dikenal sebagai salah satu *landmark* Kota London, jembatan ini telah berdiri sejak akhir abad ke-19 untuk meningkatkan aktivitas perekonomian melalui perluasan akses perdagangan dengan wilayah Timur London. Bangunan ini

begitu khas dengan berdirinya dua menara kokoh yang disambungkan oleh jembatan, baik di atas maupun bawah. Keanggunannya pun semakin bertambah dengan ornamen warna biru muda yang melapisi jembatan serta penyangganya. Jika kalian memiliki uang lebih, cobalah untuk naik ke jembatan bagian atas dari Tower Bridge untuk melihat keindahan Kota London dan Sungai Thames dari atas. Tidak jauh dari sana, kalian akan melihat Tower of London, sebuah menara bersejarah yang berdiri sejak Penaklukan Normandia di Inggris di abad ke-11. Tower of London sendiri menyimpan berbagai sejarah penting dalam mempertahankan kedaulatan Inggris karena dahulu seringkali dikepung oleh musuh dari kerajaan lain.

Setelah puas mengelilingi Tower London, berakhir pulalah petualangan jalan kaki menyusuri City of London. Sebenarnya masih banyak sekali tempat-tempat di London yang wajib untuk kalian kunjungi, mulai dari berbelanja di Oxford Street atau Harrods, mencicipi beragam makanan di Chinatown, ataupun sekedar berpiknik di Hyde Park. Bagi kalian penggila sepakbola, London jelas surganya karena terdapat begitu banyak klub sepakbola di sini, misalnya Arsenal dan Chelsea. Kalian dapat berkunjung ke stadion-stadion tersebut untuk sekedar mampir membeli cinderamata, mengikuti program tur keliling stadion,

hingga menonton langsung klub kesayangan kalian langsung dari stadion. Namun, untuk mendapatkan tiket menonton tersebut, kalian biasanya diwajibkan untuk mendaftarkan diri menjadi anggota dengan membayar sejumlah uang kemudian baru tiket dapat dipesan. Cara lainnya yakni membeli tiket melalui perantara, tetapi harganya pasti jauh lebih mahal mengingat hampir seluruh stadion di Inggris akan berkapasitas penuh ketika pertandingan berlangsung. Soal animo menonton sepakbola, fans Inggris ini memang juaranya karena sepakbola bagi mereka sudah menjadi agama. Jadi, walaupun harga tiket menontonnya cukup mahal, percayalah *it's really worth it to try it* karena pengalamannya yang begitu menakjubkan.

Mengutip kembali lagu Hijrah ke London dari The Changcuters "Dia jauh, aku rindu". Sesungguhnya lirik ini nyata adanya. Mencintai kota ini tidaklah sulit di tengah hiruk pikuk maupun hingar bingarnya, sehingga hati ini pun sudah merasa rindu, meski belum lama pulang dari sana. Sayangnya, London itu sangatlah jauh dari Indonesia, berat di ongkos untuk pergi ke sana. Namun tidak mengapa karena penulis percaya momen untuk bertemu kembali itu akan tiba di masa mendatang.



Kualitas Seorang Pemimpin

Indrawan Susanto¹⁷ & Chintya Pramasanti¹⁸

Seorang pemimpin memiliki peran yang sangat penting dalam mengarahkan dan mempengaruhi perkembangan suatu organisasi, masyarakat, bahkan negara. Bagaimana seorang pemimpin bertindak dan mengambil keputusan memiliki dampak yang signifikan pada kesuksesan dan stabilitas entitas yang dipimpinnya. Setidaknya ada tiga kualitas utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu kemampuan untuk berbuat adil, bertindak bijaksana, dan bersikap proporsional dalam setiap tindakan dan keputusannya.

Berbuat Adil

Berbuat adil adalah salah satu prinsip utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Keadilan adalah dasar dari kepercayaan dan kredibilitas seorang pemimpin di mata orang-orang yang ia pimpin. Tindakan yang adil menciptakan lingkungan yang positif di mana semua orang dalam organisasi yang ia pimpin merasa dihargai dan diperlakukan dengan baik dan benar. Ketika seorang pemimpin memperlakukan semua orang dengan adil, ini akan membangun kepercayaan yang kuat di

antara orang yang ia pimpin. Ini berarti bahwa anggota tim akan lebih cenderung mendukung dan mengikuti arahan pemimpin.

Keadilan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis di mana konflik dan ketidakpuasan dapat diminimalkan. Anggota tim akan merasa bahwa keputusan pemimpin didasarkan pada faktor-faktor yang obyektif, bukan preferensi pribadi. Ketika seseorang merasa bahwa usahanya dihargai dan dihormati, motivasinya untuk bekerja keras dan

^{17,18}Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

berkontribusi semakin tinggi. Pemimpin yang adil mendorong produktivitas dan inovasi dalam organisasi.

Bertindak Bijaksana

Tindakan bijaksana adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mempertimbangkan dengan seksama konsekuensi dari keputusan yang diambil. Seorang pemimpin bijaksana tidak hanya memikirkan jangka pendek, tetapi juga jangka panjang dan dampaknya terhadap organisasi. Kepemimpinan yang bijaksana mendorong keberlanjutan kinerja organisasi yang produktif dalam jangka panjang. Pemimpin yang bijaksana mampu mengidentifikasi solusi yang lebih baik untuk masalah yang kompleks. Mereka tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan dan berusaha mencari jalan terbaik. Anggota tim akan lebih percaya pada pemimpin yang bertindak bijaksana, karena mereka tahu bahwa keputusan yang diambil telah dipertimbangkan secara matang. Hal tersebut akan menciptakan stabilitas dan ketenangan.

Bersikap Proporsional

Tindakan proporsional berarti tindakan yang diambil oleh seorang pemimpin sejalan dengan tingkat urgensi atau dampak dari suatu situasi. Tindakan yang terlalu berlebihan atau terlalu ringan

dapat menciptakan masalah lebih besar. Pemimpin yang tindakannya proporsional dalam menangani konflik cenderung menghindari eskalasi dan mempertahankan stabilitas dalam tim.

Dalam situasi krisis, tindakan proporsional adalah kunci untuk mengatasi tantangan dengan sukses. Pemimpin yang mampu menjaga keseimbangan dalam tindakan mereka akan lebih efektif dalam mengatasi situasi sulit. Tindakan proporsional juga menciptakan keadilan. Ketika hukuman atau imbalan sesuai dengan tindakan yang diambil, anggota tim akan merasa bahwa mereka diperlakukan dengan benar.

Pemimpin yang mampu berbuat adil, bertindak bijaksana, dan bersikap proporsional dalam setiap tindakan dan keputusannya memiliki pengaruh yang positif pada organisasi yang dipimpinnya. Kualitas kepemimpinan ini menciptakan kepercayaan, harmoni, motivasi, keberlanjutan, dan solusi yang lebih baik. Dalam dunia yang terus berubah dan kompleks, pemimpin yang menginternalisasi prinsip-prinsip ini mampu menciptakan lingkungan organisasi yang lebih baik dan nyaman untuk semua orang yang ada didalamnya.



APBN 2023 telah Berjalan Satu Semester, Bagaimana Realisasinya?

Jakarta (24/07/2023) – Kementerian Keuangan kembali menggelar Konferensi Pers APBN Kita secara virtual, kali ini edisi Juli 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu beserta jajaran pimpinan menjelaskan Kinerja APBN Semester I 2023 yang terjaga sangat baik meski ekonomi global mengalami perlemahan dan memberi tekanan terhadap perekonomian nasional.

“Kondisi global memang menunjukkan kecenderungan perlemahan yang semakin terlihat. Kalau dilihat dari indikator PMI Manufaktur dari negara-negara yang dilakukan monitoring, 61.9% dari negara menagalami

kontraksi PMI, artinya PMI ada di bawah 50. Ini negara-negara yang memiliki peran yang sangat besar di dunia, yaitu Amerika Serikat, Eropa, Jerman, Perancis, Inggris, Jepang, Korea, yang merupakan negara-negara yang selama ini mempengaruhi perekonomian dan perdagangan dunia”, buka Sri Mulyani mengawali konferensi pers.

Hingga akhir Juni 2023, pendapatan negara Rp1.407,9 T tumbuh 5,4% (yoy), belanja negara Rp1.255,7 T tumbuh 0,9% (yoy), dan surplus APBN Rp152,3 T (0,71% PDB). Kondisi #APBNKiTa yang masih surplus hingga pertengahan 2023 memberikan sinyal positif bahwa defisit tahun ini

masih dapat terjaga, bahkan diturunkan.

“Hal ini juga didukung oleh kondisi ekonomi domestik Indonesia yang terjaga baik, ditunjukkan oleh indikator perekonomian yang masih bertahan di zona ekspansif, begitu juga posisi neraca perdagangan yang kembali melanjutkan surplus ke-38 meski ekspor dan impor mulai berkontraksi akibat perlemahan ekonomi global”, lanjut Sri Mulyani.

APBN akan tetap solid menjaga perekonomian dan melindungi masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan dalam bentuk Perlindungan sosial, petani dan UMKM, pendidikan, dan infrastruktur.



Pemerintah Dukung Kolaborasi UMKM dan Fintech untuk Perkuat Inklusi Keuangan

Jakarta (22/08/2023) – Melanjutkan rangkaian kegiatan Keketuaan Indonesia ASEAN 2023, Kementerian Keuangan menggelar seminar bertajuk “*Business Matching & Exploration Session Between MSMEs and Fintech*”. Seminar yang diselenggarakan pada 22 Agustus 2023 di Jakarta ini, mempertemukan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan perusahaan *financial technology* (fintech) untuk saling berinteraksi, bertukar pengetahuan, dan mengeksplorasi peluang kolaborasi. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian pertemuan Menteri Keuangan dan Bank Sentral negara ASEAN di Jakarta, 22-25 Agustus 2023.

Mengawali seminar, Adi Budiarmo, Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal menyampaikan bahwa pemenuhan akses terhadap pembiayaan bagi UMKM di Indonesia merupakan

tantangan yang sangat besar. Saat ini, porsi kredit UMKM di sistem perbankan kita baru sekitar 20% terhadap total kredit perbankan. Pemerintah dan otoritas terus berupaya untuk mendorong porsi kredit UMKM ini ke tingkat 30% pada tahun 2024.

“Mengingat begitu banyaknya UMKM yang masih kesulitan mengakses pembiayaan, tentu sumber-sumber pembiayaan alternatif perlu dioptimalkan. Salah satu sumber alternatif tersebut adalah fintech,” jelas Adi Budiarmo.

Lebih lanjut, Adi menyampaikan bahwa pemerintah menyadari pentingnya peran fintech di dalam perekonomian dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM. Oleh sebab itu, Pemerintah terus berupaya untuk memperkuat fintech, salah satunya melalui penguatan dasar hukum fintech di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

(UU P2SK).

Adi menambahkan bahwa Kementerian Keuangan memiliki 4 deliverables terkait dengan topik peningkatan inklusi keuangan melalui inklusi keuangan digital bagi UMKM, yakni: (1) mengembangkan suatu platform untuk berbagi informasi dan praktik terbaik mengenai produk dan layanan serta literasi keuangan digital untuk mendukung UMKM; (2) mengembangkan suatu policy toolkit untuk mendorong inklusi keuangan digital bagi UMKM, terutama untuk mendorong adopsi dan penggunaan pembayaran digital dan layanan keuangan digital oleh usaha mikro; (3) menginisiasi diskusi tingkat tinggi untuk membicarakan inisiatif di kawasan dalam mendorong inklusi dan literasi keuangan digital bagi UMKM; dan (4) memfasilitasi suatu *business matching and exploration session* antara UMKM dan fintech.



Neraca Perdagangan Indonesia Tetap Surplus di Tengah Risiko Perlambatan Global

Jakarta (16/09/2023) – Neraca perdagangan bulan Agustus 2023 kembali mencatatkan surplus sebesar USD3,12 miliar. Secara kumulatif dari Januari hingga Agustus 2023, surplus neraca perdagangan mencapai USD24,34 miliar. Dengan demikian, Indonesia telah mengalami surplus perdagangan selama 40 bulan berturut-turut.

“Neraca perdagangan Indonesia masih tercatat surplus di bulan ini, di tengah risiko global yang masih tinggi karena adanya penurunan harga komoditas dan perlambatan ekonomi dunia. Artinya resiliensi Indonesia masih terjaga dengan baik dan ini harus tetap kita pertahankan bahkan kita tingkatkan,” ungkap Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu.

Ekspor bulan Agustus 2023 tercatat USD22,00 miliar yang berkontraksi 21,21% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, terutama didorong oleh penurunan ekspor semua sektor. Secara kumulatif,

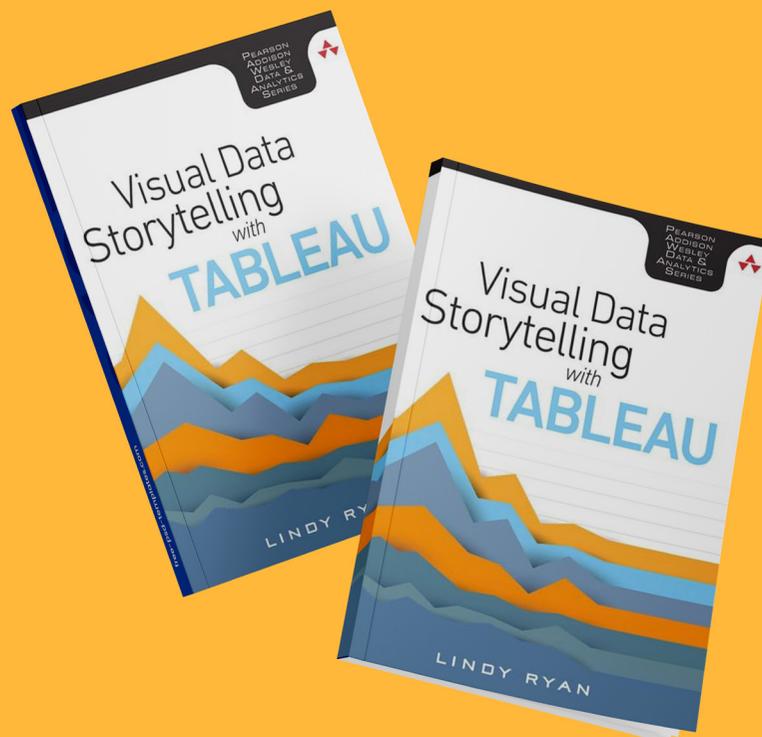
ekspor periode Januari hingga Agustus 2023 mencapai USD171,52 miliar. Sementara itu, impor di bulan Agustus 2023 tercatat USD18,88 miliar, berkontraksi 14,77% (yoy), terutama bersumber dari penurunan impor bahan baku/penolong dan barang modal, sedangkan impor barang konsumsi masih tumbuh sebesar 15,47% (yoy). Secara kumulatif impor periode Januari hingga Agustus 2023 tercatat USD147,18 miliar.

Penurunan kinerja ekspor tidak hanya dialami Indonesia, melainkan juga terjadi di banyak negara, akibat melemahnya aktivitas ekonomi dunia. Ekspor Tiongkok dan India berkontraksi selama Januari hingga Agustus 2023. Di Kawasan ASEAN, ekspor Vietnam juga mengalami kontraksi dalam periode yang sama. Sementara Malaysia dan Thailand mengalami kontraksi pada periode Januari hingga Juli 2023. Hal ini menunjukkan bahwa dampak perlambatan ekonomi global terjadi secara luas.

Meskipun pertumbuhan

ekspor Indonesia secara nilai termoderasi, namun masih menunjukkan peningkatan secara volume. Permintaan ekspor produk unggulan Indonesia masih kuat, tercermin dari pertumbuhan volume ekspor non migas yang masih tumbuh 9,5% pada periode Januari hingga Agustus 2023. Volume ekspor bahan bakar mineral termasuk batu bara, minyak hewani atau nabati, besi baja, kendaraan, logam mulia dan nikel, secara kumulatif pada Januari hingga Agustus 2023 masih meningkat signifikan.

Ke depan, kinerja ekspor-impor Indonesia diperkirakan masih berada dalam tren positif, meskipun sedikit melambat seiring dengan moderasi harga komoditas dan perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Keberlanjutan tahapan hilirisasi mineral yang terus didorong untuk dapat mendukung dan berpartisipasi dalam rantai pasok global juga diyakini terus memberikan manfaat yang signifikan pada daya saing dan kinerja ekspor nasional.



Visual Data Storytelling With Tableau

Anggi Pratiwi¹⁹

Sebuah data berperan sangat banyak di era saat ini, salah satunya ialah data yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Namun data yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan bukanlah hanya dari satu data, namun dari kumpulan banyak data. Kumpulan banyak data agar lebih mudah dipahami maka digunakanlah visualisasi (*visualization*). Visualisasi Data merupakan bagaimana menyajikan data dengan cara menafsirkan, menganalisis, serta konteks hingga pengambilan tindakan

dari data yang tersedia tersebut. Visualisasi dapat mengarahkan pengguna dari satu arah ke arah lainnya berdasarkan data yang dipilih, teknik yang digunakan, serta fokus dalam pembuatannya. *Tools* untuk membangun visualisasi data sangat beragam, salah satunya ialah Tableau.

Tableau adalah perusahaan *software* dibidang analisis visualisasi data yang terkemuka yang berfokus pada eksplorasi data visual dan interaktif melalui kemampuan analitis

yang kompleks serta fitur *dashboarding* dan *storytelling* yang tidak ditemukan di *software* lainnya. Tableau memungkinkan untuk pengguna terhubung ke lebih dari empat puluh sumber data yang berbeda. Dalam buku berjudul "*Visual Data Storytelling With Tableau*" akan berfokus pada penjelasan dasar, pembelajarans secara kontekstual, dan keterampilan yang dapat dipraktikkan secara langsung untuk dapat berhasil memanfaatkan visualisasi data untuk dapat

¹⁹Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

merepresentasikan data yang dimiliki oleh pengguna. Terdapat 10 bab dalam buku ini untuk dapat memberikan landasan pengetahuan yang menjadi dasar tentang konsep-konsep yang akan dibahas.

Pada Bab 1 yang berjudul **Storytelling in a Digital Era** membahas mengenai dasar bagaimana dari visualisasi data hingga menjadi suatu narasi atau cerita dalam menyampaikan data tersebut. Konsep dari kedua hal tersebut seperti serupa namun tetaplah berbeda. Selain itu dibahas juga mengenai bagaimana kedua praktek tersebut bertransformasi di era digital saat ini, dan bagaimana teknologi baru mendorong kedua konsep tersebut. Bab ini mengeksplorasi nilai visual dari *data storytelling* sebagai komunikasi data serta bagaimana *data storytelling* merupakan suatu hal penting dalam pengambilan suatu keputusan maupun dalam bidang bisnis. Sementara pada Bab 2 pada buku ini berjudul **The Power of Visual Data Stories** yang membahas dengan menggunakan contoh-contoh nyata untuk menganalisis kekuatan cerita data visual dalam mengomunikasikan penemuan serta pengetahuan yang tersembunyi dalam data yang ternyata visualisasi dan cerita data ternyata begitu berpengaruh bagi manusia baik dari perspektif kognitif maupun antropologis dengan

membandingkan otak data dengan otak dari suatu cerita. Pada Bab ke-3 yang berjudul **Getting Started with Tableau** mengalihkan fokus untuk dapat mulai mengeksplorasi ekosistem dari Tableau. Bab ini pembaca dapat meninjau produk *software* yang berbeda-beda serta memberikan detail tentang penggunaan Tableau. Pembaca dapat mulai menjalani proses untuk penggunaan Tableau serta meninjau apa yang perlu diketahui data apa saja yang akan dibawa ke Tableau untuk dapat mempersiapkan proses analitik dan visualnya.

Bab 4 pada buku ini berjudul **Importance of Context in Storytelling** yang menjelaskan pentingnya suatu konteks dan peran dari suatu data untuk membantu saat membuat *data storytelling* dalam mengajukan suatu pertanyaan yang tepat guna membangun kerangka cerita. Pada bab ini juga membahas penjelasan analisis eksplorasi, bagaimana mengumpulkan untuk kebutuhan *stakeholders*, dan strategi untuk keberhasilan penyampaian *data storytelling* (termasuk pengulangan, alur narasi, pertimbangan dari narasi lisan dan tertulis yang mendukung visualisasi, dan struktur yang dapat mendukung *data storytelling* untuk mendapatkan hasil maksimal). Selain itu pada bab ini juga dijelaskan teknik yang bermanfaat di Tableau untuk menyusun struktur narasi data yang efektif.

Selanjutnya pada Bab 5 pada buku ini berjudul **Choosing the Right Visual** menjelaskan mengenai jenis visualisasi yang umum digunakan untuk mengomunikasikan data dalam lingkungan bisnis, penggunaan yang sesuai untuk masing-masing visualisasi, dan penggunaan visualisasi berdasarkan contoh yang dibuat dari katalog yang tersedia di Tableau. Selain itu bab ini juga mencakup teknik untuk membantu dalam menilai kapan harus menggunakan suatu grafik serta kapan harus menghindari jenis grafik tertentu, dan bagaimana cara menghasilkannya serta beberapa fitur khusus di Tableau yang dirancang untuk membantu mendapatkan hasil maksimal dari grafik tersebut.

Bab selanjutnya ialah bab 6 **Curating Visuals for Your Audience**. Pada bab ini menggambarkan bagaimana mendalami kognisi manusia dan bagaimana persepsi visualisasi untuk dapat membingkai suatu atribut seperti ukuran, warna, dan posisi yang akan digunakan dalam proses membuat cerita data. Selain itu pembaca juga akan mempelajari cara menggunakannya secara strategis dan membuat hierarki komponen visualisasi untuk berkomunikasi secara efektif. Pada bab ini juga menggambarkan kerangka kerja untuk dapat menyusun alur cerita dan tata letak dengan visualisasi di Tableau yang akan dieksplorasi secara

mendalam pada bab-bab berikutnya.

Berikutnya Bab 7 **“Preparing Data for Storytelling”** yang mencakup awal proses dari *data storytelling* dengan disertai langkah-langkah pemrosesan yang diperlukan untuk menyiapkan data yang tidak beraturan untuk dapat di analisis secara visual dan dibuat *storytelling* di aplikasi Tableau. Bab ini juga mempelajari tentang persiapan data untuk dianalisis, bagaimana menghubungkan ke data, dan eksplorasi secara visual di Tableau. Bab ini akan memandu pembaca melalui proses yang diawali dengan mengeksport data mentah dari platform survei, bagaimana menyiapkan spreadsheet manual di Excel, hingga bagaimana menggunakan Tableau 10 dan alat eksternal lainnya untuk bisa mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan sehingga bisa mulai membuat cerita data visual yang menarik. Bab berikut pada buku ini ialah Bab 8 yang berjudul **“Storyboarding Frame by Frame”** yang merupakan lanjutan dari bab sebelumnya namun menjelaskan lebih dalam lagi proses untuk membangun narasi data dengan membahas bagaimana cara membangun visualisasi yang memiliki tujuan dan bagaimana aturan dalam membuat suatu *data storytelling*. Bab ini memiliki pemahaman yang lebih dekat dalam membangun serangkaian

visualisasi data, sehingga dapat meninjau bagaimana cara membuat dashboard dan bagaimana mengatur serta memvisualisasikan dalam sebuah cerita. Selain itu dalam bab ini juga dibahas mengenai bagaimana menggabungkan fitur-fitur seperti anotasi dan *highlighting*, serta cakupan untuk meninjau kembali diskusi yang ada sebelumnya mengenai konteks untuk menyajikan *data storytelling* yang menarik.

Pada Bab 9 **Advanced Storytelling Charts** dalam buku ini menjelaskan bagaimana mengeksplorasi strategi lanjutan dalam penyampaian *data storytelling* yang terdapat di luar bagan dan dasar grafik yang disediakan dalam fungsi aplikasi Tableau. Hal ini mencakup cara membuat bagan tingkat lanjut yang memerlukan pemformatan dan penghitungan tambahan, termasuk garis waktu. Bab terakhir dalam buku ini ialah Bab 10 yang berjudul **Closing Thoughts**, yang merangkum pelajaran utama yang dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Bab ini memberikan daftar praktik serta saran praktis agar pembaca dapat terus menguasai pengisahan data serta dapat membahas sumber daya tambahan yang tersedia untuk mendukung teks tersebut.

Buku ini sangat menarik dan bermanfaat untuk dibaca dan dipelajari, serta sebagai referensi karena buku ini

menjelaskan mengenai bagaimana menyajikan data dalam bentuk visual. Selain itu buku ini juga mempelajari perbedaan visualisasi data untuk analisis versus presentasi, bagaimana menceritakan kisah visual yang mengomunikasikan suatu pengetahuan dan memberikan dampak, bagaimana cara membuat grafik penting di Tableau, serta bagaimana mengarahkan perhatian audiens untuk langsung ke bagian penting dalam *data storytelling* yang dibuat. Buku ini ditukukan bagi semua khalayak yang memiliki data dan ingin menggunakan data tersebut untuk dikomunikasikan dengan cara yang menarik dan mudah diingat. Selamat membaca!



Glosarium

Transformasi Ekonomi

proses terus-menerus menggerakkan sumber daya manusia (SDM) dan lain-lain dari sektor-sektor yang memiliki produktivitas rendah ke sektor-sektor yang lebih tinggi produktivitasnya (perubahan struktural).

Hilirisasi Sektor SDA

merupakan suatu usaha dan upaya produktif untuk memaksimalkan bahan mentah yang di dapat dari eksploitasi SDA agar menjadi barang atau produk setengah jadi atau produk jadi.

Diversifikasi Perekonomian

adalah suatu strategi yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada satu atau beberapa sektor utama, dengan mengembangkan sektor-sektor alternatif yang memiliki potensi pertumbuhan dan penghasilan.

Volatilitas Pasar

ukuran statistik yang digunakan untuk menunjukkan penyebaran imbal hasil sekuritas atau indeks pasar

tertentu. Biasanya, semakin besar volatilitas, menunjukkan semakin besar risiko dari sebuah produk atau aset investasi.

Krisis *Suprime Mortgage*

merupakan istilah untuk kredit perumahan (*mortgage*) yang diberikan kepada debitur dengan sejarah kredit yang buruk sehingga relative berisiko tinggi. Penyaluran *subprime mortgage* di AS mengalami peningkatan pesat pada 2002 sampai 2005. Pengemasan *subprime mortgage* ke dalam berbagai

bentuk sekuritas lain, yang kemudian diperdagangkan di pasar finansial global merupakan sumber krisis pada tahun 2007 – 2009.

Koefisien Gini Ratio

adalah suatu metode penghitungan terkait distribusi pendapatan atau, bila perlu, kekayaan seluruh populasi sebuah negara. Cara ini pertama kali dicetuskan oleh Corrado Gini, seorang pakar ilmu statistik asal Italia pada tahun 1912 lalu. Koefisien Gini biasanya digunakan untuk mengukur ketidakmerataan perekonomian negara.

Penyakit Belanda/*Dutch Disease*

merupakan istilah yang diperkenalkan oleh The Economist pada tahun 1977 untuk menggambarkan pelemahan sektor manufaktur di Belanda, setelah ditemukan cadangan gas di Groningen, yang merupakan cadangan gas terbesar di Eropa. Secara mudah, *Dutch Disease* dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan di sektor tertentu (*booming sector*), yang biasanya bersumber dari ekstraksi sumber daya alam atau produksi tanaman komoditas, dapat menyebabkan melemahnya sektor lain (*lagging sector*), seperti sektor manufaktur atau pertanian.

Global Innovation Index

adalah pemeringkatan yang dibuat oleh the World Intellectual Property Organization (WIPO) untuk menilai input dan output inovasi. *Global Innovation Index* (GII) memberikan peringkat tahunan suatu negara berdasarkan kapasitas suatu negara untuk, dan keberhasilan dalam inovasi .

Ratio R&D Expense

adalah biaya yang dikeluarkan untuk penelitian dan pengembangan barang atau jasa perusahaan serta kekayaan intelektual yang dihasilkan dari proses pengembangan tersebut.

Industri Kreatif

adalah segala proses penciptaan, kreativitas, ide, dan gagasan dari seseorang atau kelompok yang kemudian dapat menghasilkan karya atau produk setelahnya. Industri kreatif itu sendiri merupakan penggabungan dari dua kata, yakni industri dan kreatif.

Indikator PMI Manufaktur

adalah sebuah indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur kesehatan sektor manufaktur atau sektor jasa dalam suatu negara atau wilayah tertentu.

Dana Abadi Kebudayaan

merupakan bagian dari Dana Abadi di Bidang Pendidikan sebagaimana diatur di dalam Perpres No. 111/2021. Penggunaan hasil pengembangan DAKB meliputi fasilitasi bidang kebudayaan bagi komunitas dan pelaku budaya, produksi kegiatan kebudayaan, produksi media, dan program layanan lainnya sesuai arahan Dewan Penyantun.

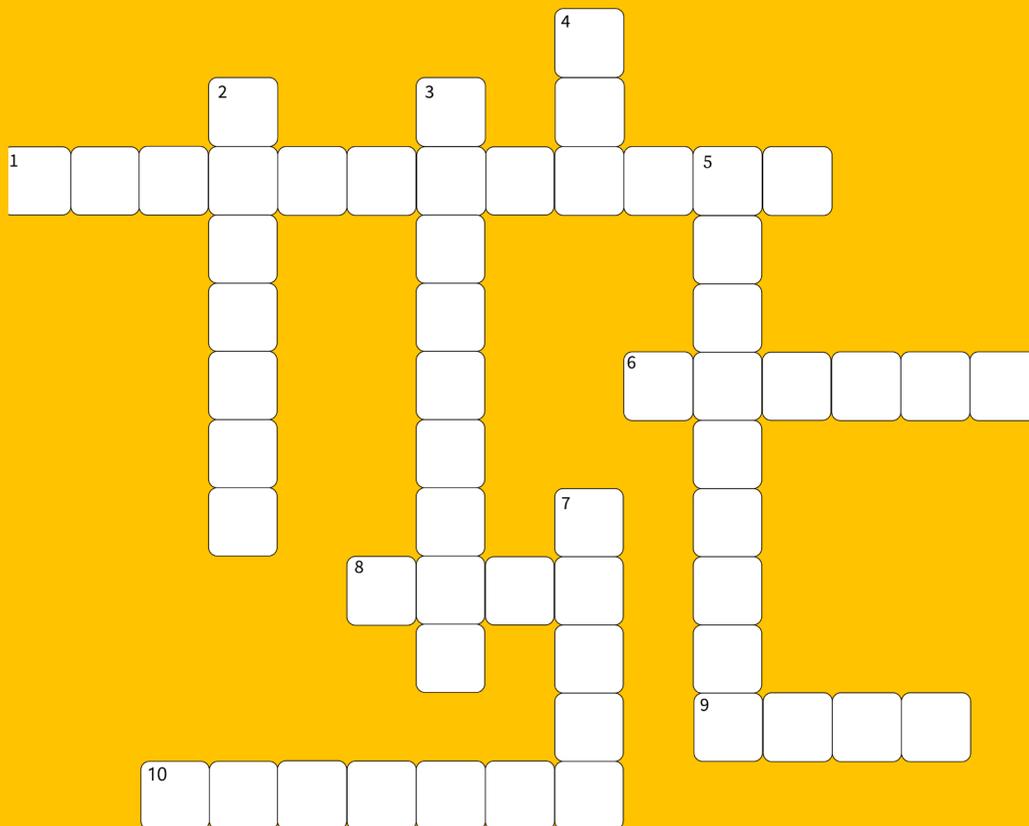
Track Acces Charge

adalah biaya yang harus dibayar oleh penyelenggara sarana perkeretaapian untuk penggunaan prasarana perkeretaapian yang dioperasikan oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian. Besarnya TAC dihitung berdasarkan pedoman penetapan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kawasan Ekonomi Khusus

merupakan kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi dengan manfaat perekonomian tertentu. Tujuan utama pengembangan KEK adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, pemertaan pembangunan, dan peningkatan daya saing bangsa.

Quiz FISKAL!



Mendatar

- 1 Perubahan (sinonim)
- 6 Rumah Adat Sumatera Barat
- 8 Mundur (antonim)
- 9 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Selisih antara anggaran pendapatan dengan
10 anggaran belanja yang nilainya negatif

Menurun

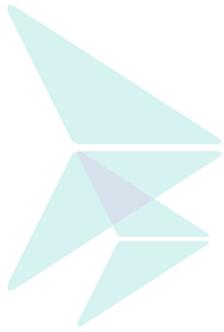
- 2 Menampilkan sesuatu yang baru
- 3 Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat
- 4 Sumber Daya Manusia
- 5 Aman sentosa dan makmur
- 7 Lawan kata dari Mudah

Pemenang Kuis Edisi II/2023:

1. Damia Liana
2. Tri Nurdiyanso
3. Aqila Bagus Misbahuddin

Ada hadiah menarik bagi yang beruntung, pemenang akan diumumkan pada edisi selanjutnya

Kirim jawaban melalui email ke:
wartafiskal@kemenkeu.go.id



BADAN KEBIJAKAN FISKAL

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Komp. Kementerian Keuangan

Gd. R.M. Notohamiprodjo
Jl. Dr. Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat 10710
Telp. +62 21-34833486

fiskal.kemenkeu.go.id